

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Sektor Potensial dalam Kawasan Strategis Solo Raya Pada Periode 2019-2023”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Faisal, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Ahmad Syakir Kurnia, S.E., M.Si., Ph.D., selaku Kepala Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro.
3. Dr. Jaka Aminata, S.E., M.A., selaku Kepala Program Studi Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
4. Nenik Woyanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dalam memberikan ilmu dan bimbingan dalam penyusunan skripsi.
5. Evi Yulia Purwanti, S.E., M.Si., selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan selama masa perkuliahan di program studi Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Seluruh dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan wawasan dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
7. Kedua orang tua penulis, Bapak Kusnan dan Ibu Sri Sulistyowati, yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis hingga saat ini.
8. Adik penulis, Janiz, yang turut memberikan dukungan dan doa kepada penulis.

9. Sahabat penulis “Si Paling Kating” di perkuliahan, Ardiansyah Wiratama, Tiara Dwi Maharani, Yusuf Putra Sri Ardina, Muhammad Aris Rijalul Hikam, Muhammad Rizki Naufal, dan Ahmad Raihan Farhan yang telah berbagi kenangan Bersama.
10. Teman-teman jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2021, Dofa, Nabil, Kemala, Runa, Gaza, Dipo, dan teman-teman lainnya, yang telah turut berbagi waktu dan momen bersama selama masa perkuliahan.
11. Sahabat penulis sedari masa SMA, Salma, Faiza, Putri, Bintan, dan Marsya yang turut hadir memberikan dukungan serta semangat dan berbagi kenangan hingga saat ini.
12. Teman-teman KKN Desa Muneng, Kabupaten Temanggung, Raihan, Farah, Yohana, Essa, dan Fidini yang saling memberikan dukungan dan semangat hingga saat ini.
13. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu juga turut membantu memberikan motivasi dan doa dalam penyelesaian skripsi ini.
14. Terakhir, diri penulis pribadi yang selalu ada dan kuat dalam segala prosesnya.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini memiliki cukup banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang dinilai dapat membangun dan mengembangkan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan ilmu pengetahuan di waktu mendatang.

Semarang, 12 Desember 2025

Penulis,



Jiddan Nawfal Hidayat

12020121130074

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
14.1 Latar Belakang Masalah.....	1
14.2 Rumusan Masalah.....	13
14.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
Tujuan	14
Kegunaan	15
14.4 Sistematika Penulisan	16
BAB II TELAAH PUSTAKA.....	18
2.1 Landasan Teori.....	18
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi Wilayah.....	18
2.1.2 Ketimpangan Antar Wilayah	20
2.1.3 Teori Sektor Unggulan dan Non Unggulan	21
2.1.4 Pengukuran Ketimpangan Wilayah.....	22
2.1.5 Potensi Sektor Ekonomi Wilayah.....	25
2.2 Penelitian Terdahulu	28
2.3 Kerangka Pemikiran.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	35

3.1.1	Pertumbuhan Ekonomi	35
3.1.2	Produk Domestik Regional Bruto	35
3.1.3	PDRB Perkapita	36
3.1.4	Jumlah Penduduk.....	36
3.2	Jenis dan Sumber Data.	36
3.3	Metode Pengumpulan Data	37
3.4	Metode Analisis	37
3.4.1	Analisis Ketimpangan Antar Wilayah	38
3.4.2	Anlisis Potensi Ekonomi Wilayah.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	46
4.1.1	Kondisi Geografis Kawasan Solo Raya.....	46
4.1.2	Kondisi Kependudukan Kawasan Solo Raya	50
4.1.3	Kondisi Ekonomi Kawasan Solo Raya.....	51
4.2	Analisis Data	53
4.2.1	Ketimpangan Antar Daerah di Kawasan Solo Raya	53
4.2.2	Potensi Perekonomian Kawasan Solo Raya	56
4.3	Interpretasi Data	76
BAB V PENUTUP.....		92
5.1	Simpulan	92
5.2	Keterbatasan.....	91
5.3	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		93
LAMPIRAN		101

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	30
Tabel 4.1	Luas Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya	50
Tabel 4.2	Kondisi Demografis Kawasan Solo Raya (Tahun 2019-2023)	51
Tabel 4.3	Kondisi Ekonomi Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023	52
Tabel 4.4	Perkembangan PDRB Perkapita Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023	54
Tabel 4.5	Pengukuran Ketimpangan Kawasan Solo Raya (Indeks Williamson)	55
Tabel 4.6	Pengukuran Ketimpangan Kawasan Solo Raya (Indeks Theil)	56
Tabel 4.7	Hasil Indeks Theil Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023	57
Tabel 4.8	Hasil Location Quotient Kota Surakarta Tahun 2019-2023	59
Tabel 4.9	Hasil Location Quotient Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023	60
Tabel 4.10	Hasil Location Quotient Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2023	61
Tabel 4.11	Hasil Location Quotient Kabupaten Karanganyar Tahun 2019- 2023	62
Tabel 4.12	Hasil Location Quotient Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2023	64
Tabel 4.13	Hasil Location Quotient Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023	65
Tabel 4.14	Hasil Location Quotient Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023	66
Tabel 4.15	Analisis Perhitungan <i>National Share</i> (Nij) Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	68
Tabel 4.16	Analisis Perhitungan <i>Proportional Shift</i> (Mij) Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	69
Tabel 4.17	Analisis Perhitungan <i>Differential Shift</i> (Cij) Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	71
Tabel 4.18	Analisis Perhitungan <i>Shift share</i> (Dij) Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	73
Tabel 4.19	Perbandingan Analisis Location Quotient dan Shift Share	

Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya.....	76
Tabel 4.20 Perbandingan Indeks Williamson Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023	81



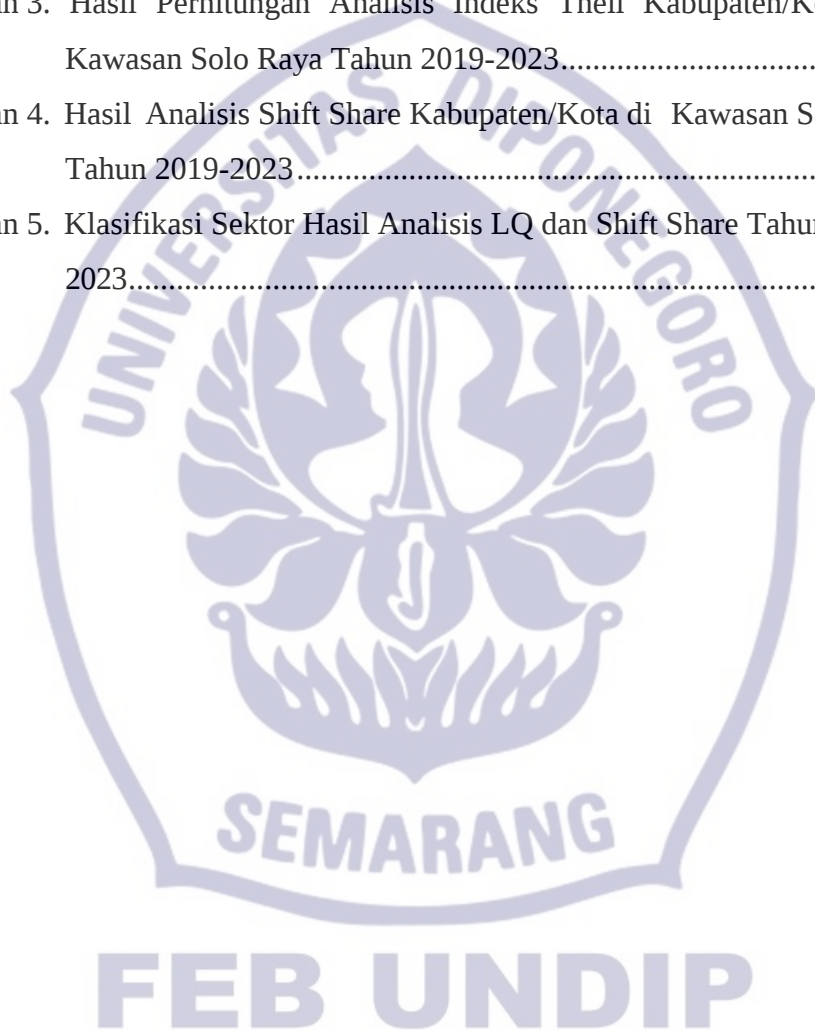
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	3
Gambar 1.2	Tren Ketimpangan di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.....	5
Gambar 1.3	PDRB Per Kapita ADHK di Kabupaten/Kota dalam Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Rp juta).....	9
Gambar 1.4	Rata-Rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (juta).....	10
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	34
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kawasan Solo Raya (Solo Raya).....	48
Gambar 4.2	Tren Perkembangan Ketimpangan di Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya 2019-2023.....	79
Gambar 4.3	Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kota Surakarta.....	82
Gambar 4.4	Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Boyolali.....	84
Gambar 4.5	Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Sukoharjo.....	85
Gambar 4.6	Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Karanganyar.....	86
Gambar 4.7	Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Wonogiri.....	87
Gambar 4.8	Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Sragen.....	88
Gambar 4.9	Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Klaten.....	90

FEB UNDIP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data PDRB Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023.....	104
Lampiran 2. Hasil Perhitungan Analisis Indeks Williamson Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023.....	108
Lampiran 3. Hasil Perhitungan Analisis Indeks Theil Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023.....	107
Lampiran 4. Hasil Analisis Shift Share Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023.....	109
Lampiran 5. Klasifikasi Sektor Hasil Analisis LQ dan Shift Share Tahun 2019-2023.....	116



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan menjadi aspek penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari perannya selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga berfokus untuk meminimalisir angka kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sehingga secara tidak langsung pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keberhasilan pembangunan sendiri dilihat dari pertumbuhan ekonomi negara tersebut (Raharti et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi yang berhasil adalah ketika terjadi peningkatan signifikan dalam sektor ekonomi dibandingkan tahun sebelumnya, dimana dalam hal ini berarti terdapat peningkatan distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Argumen ini didukung oleh Amartya Sen dalam (Runesi, 2023) yang mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dari PDB, namun juga bagaimana kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.

Belakangan ini, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dilihat dalam skala nasional saja, namun juga berfokus pada tingkat wilayah/daerah. Hal ini membuat setiap daerah diwajibkan untuk dapat memaksimalkan potensi dari sumber daya yang ada, termasuk dalam menghasilkan output produksi dan pemerataan pendapatan. Secara tidak langsung, kebijakan ekonomi yang otonom ini mampu mendorong tiap daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing

wilayahnya, tentunya dengan tetap memperhatikan keanekaragaman dan ciri khas masing-masing daerah (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022). Namun hal ini juga memicu terjadinya kompetisi antar wilayah dimana terdapat dorongan untuk mementingkan kepentingan daerah mereka sendiri sehingga memunculkan kembali isu ketidakmerataan pembangunan antar wilayah yang ada (Hamid, 2015).

Disparitas atau ketimpangan antar wilayah bukanlah isu baru terlebih lagi berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah. Todaro & Smith (2006) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah memiliki sifat multidimensional yang bertujuan untuk memberikan perubahan signifikan pada struktur ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat daerah itu sendiri dimana hal tersebut mencakup kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran. Keadaan masyarakat yang memiliki standar hidup yang berbeda-beda juga menjadi salah satu faktor terciptanya gap atau kesenjangan antar wilayah. Hal ini tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah dikarenakan adanya ketimpangan akan memberikan dorongan kepada daerah-daerah tertinggal untuk dapat meningkatkan taraf hidup mereka melalui sumber daya yang ada. Melihat hal tersebut, ketimpangan menjadi sebuah dampak positif apabila dapat diselesaikan dengan baik. Akan tetapi, menurut Todaro, 2004 dalam (Ince Weya, 2022) semakin tinggi suatu ketimpangan yang terjadi akan memicu dampak negatif seperti inefisiensi ekonomi, ketidakstabilan sosial, dan pandangan ketidakadilan dalam masyarakat.

Tingkat pembangunan antar daerah yang berbeda tentunya menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan wilayah. Tinggi rendahnya ketimpangan wilayah dapat dilihat dari Indeks Williamson. Analisis Indeks Williamson di

Provinsi Jawa Tengah yang memberikan data rata-rata ketimpangan 0,64% dalam periode 2019-2023 menegaskan bahwa ketimpangan yang terjadi belum ditangani dengan cukup baik sehingga penurunan kesenjangan wilayah tidak terlalu signifikan setiap tahunnya.

Gambar 1.1
Ketimpangan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (2025)

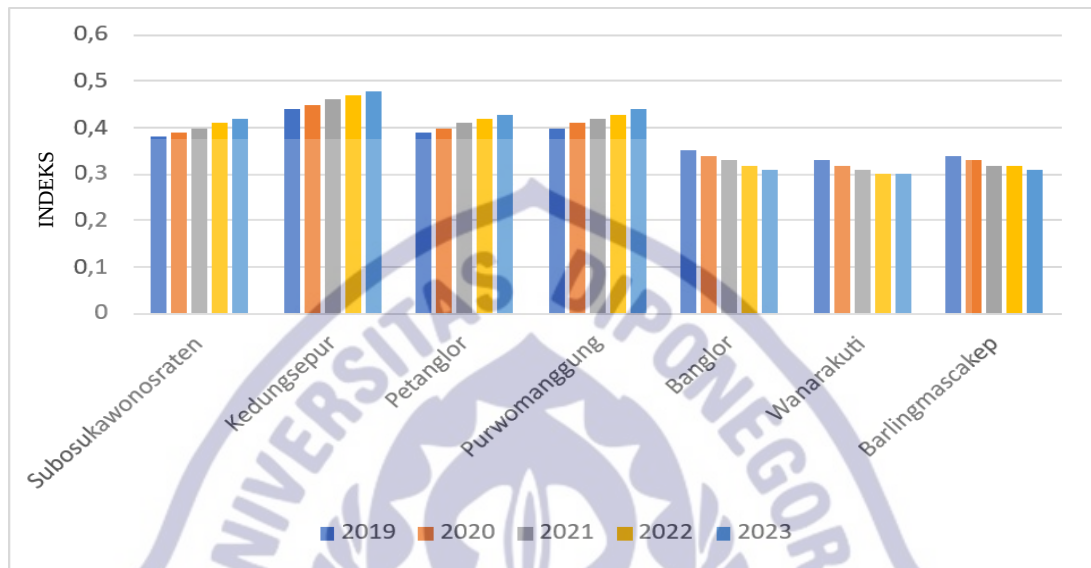
Berdasarkan Gambar 1.1, menyatakan bahwa ketimpangan antar wilayah di Provinsi Jawa Tengah tergolong cukup tinggi dan tidak mengalami perubahan yang fluktuatif. Ketimpangan di Kawasan Solo Raya memiliki rata-rata 0,6429 dalam rentang waktu 2019 hingga 2023 dimana dalam jangka waktu 2020- 2022 menjadi titik ketimpangan yang cukup tinggi dengan angka di atas rata-rata secara keseluruhan. Tingginya angka ketimpangan tersebut disebabkan karena adanya wabah Covid-19 pada permulaan tahun 2020 sehingga kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan standar hidupnya menurun yang dalam hal ini mengakibatkan melemahnya aktivitas perekonomian baik secara regional maupun nasional. Pasca Covid-19, Provinsi Jawa Tengah dalam fase pemulihan

ekonomi dimana hal ini terlihat pada hasil analisis Indeks Williamson yang menurun perlahan dari 2020 hingga 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi dan pertumbuhan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah mulai membaik walaupun tingkat ketimpangan yang ada masih tergolong cukup tinggi. Provinsi Jawa Tengah sendiri menjadi salah satu prioritas dalam percepatan pembangunan dalam Perpres No.79 Tahun 2019 guna meminimalisir tingkat ketidakmerataan.

Ketidakmerataan antar wilayah inilah yang mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk kerjasama antara kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dan PP No.47/1996 tentang RTRW Nasional. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 8 kawasan kerjasama kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari Kawasan Barlingmascakep, Kawasan Solo Raya, Kawasan Kedungsepur, Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor, Kawasan Purwomangung, Kawasan Bregasmalang, dan Kawasan Petanglong. Kawasan kerjasama ini disebut juga kawasan strategis yang memiliki tujuannya masing-masing.

Keberadaan sistem inilah yang kemudian mengarah pada aktivitas perekonomian yang berfokus pada pusat wilayah di masing-masing kawasan tersebut dengan adanya dukungan dari daerah-daerah penyokongnya. Secara tidak langsung, hal ini menyebabkan adanya perbedaan tingkat pertumbuhan perekonomian tiap kawasan yang kemudian memengaruhi pembangunan dan menciptakan ketimpangan ekonomi.

Gambar 1.2
Tren Ketimpangan di Kawasan Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (2025)

Solo Raya menjadi satu dari empat kawasan dengan tren ketimpangan yang cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir bersama dengan Kawasan Kedungsepur, Petanglor, dan Purwomanggung. Rata-rata tersebut mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan di Kawasan Solo Raya terbilang cukup tinggi dengan kisaran 0,6429 dalam kurun waktu 2019-2023, selain itu hasil pembangunan yang cenderung berkembang pesat di kota pusatnya yaitu Surakarta menunjukkan bahwa daerah pendukungnya tidak berproses signifikan dilihat dari Gambar 1.3 yakni rata-rata PDRB perkapita yang dihasilkan setiap daerah yang terbilang sangat jauh dari Kota Surakarta itu sendiri. Solo Raya juga menjadi salah satu kawasan strategis dengan potensi perekonomian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Peningkatan angka ketimpangan di kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya ini dilatarbelakangi oleh perbedaan masing-masing daerah dalam mengelola dan mengembangkan sektor unggulan yang ditujukan untuk pertumbuhan aktivitas perekonomian.

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya cenderung mengalami peningkatan dan bergerak tidak signifikan dengan rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,4015 dalam lima tahun. Hal ini menandakan bahwa setiap kabupaten/kota yang ada belum mampu mengatasi kesenjangan hasil pembangunan dan pendapatan serta belum optimal dalam memanfaatkan potensi perekonomian di setiap daerah (Larasati & Setya Wijaya, 2022)

Berbeda dengan Kawasan Kedungsepur yang lebih berfokus pada kawasan metropolitan dengan potensi pertumbuhan industri dan jasa serta tingkat urbanisasi yang tinggi, Kawasan Solo Raya cenderung untuk mengembangkan kawasan metropolitan yang mampu memadukan potensi dari sektor pertanian, UMKM, pariwisata, dan industri kecil. Kawasan Solo Raya juga memiliki fungsi sebagai Kawasan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan juga Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang berfokus pada pengembangan sektor pariwisata dengan dukungan sektor lain seperti pertanian dan industri.

Kawasan Solo Raya sendiri merupakan kawasan kerjasama di Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Surakarta sebagai pusatnya dan beberapa kabupaten sebagai daerah pendukungnya meliputi Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kawasan ini awalnya merupakan karesidenan Surakarta yang beroperasi pada masa kolonial sebagai wilayah administrasi. Kota Surakarta sendiri ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang bertujuan untuk menggerakkan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kawasan Solo Raya. Sebagai pusat, Kota Surakarta tidak hanya berfokus pada

perkembangan perekonomian lokal saja namun juga berinteraksi dengan daerah lain dalam kawasan yang sama.

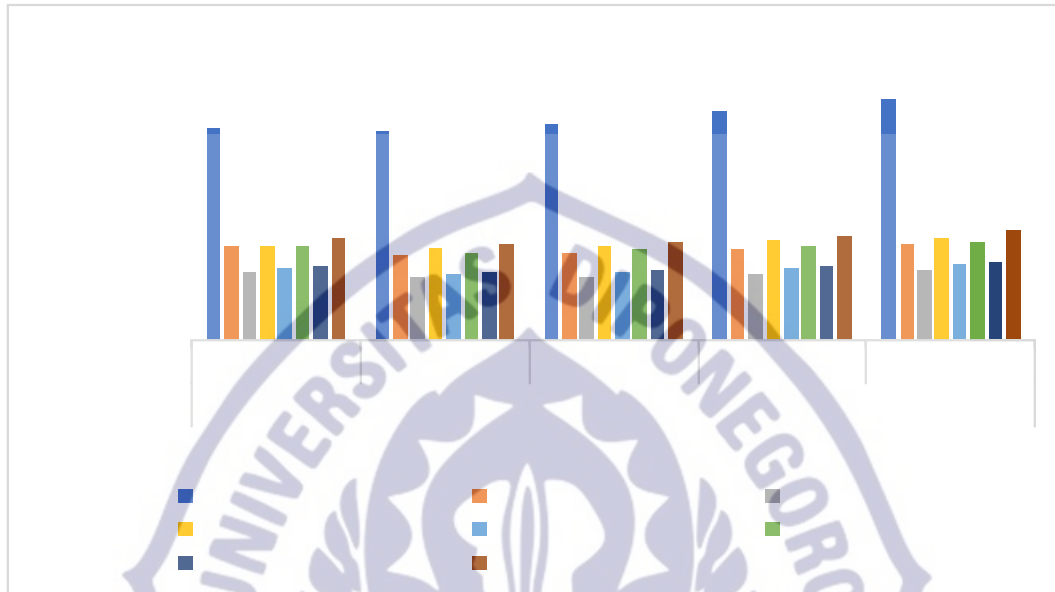
Selain itu terdapat sektor-sektor yang dinilai berperan penting dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Kawasan Solo Raya yang nantinya akan memengaruhi tingkat ketimpangan yang terjadi di kawasan tersebut. Sektor-sektor inilah yang nantinya akan diklasifikasikan dalam sektor basis dan non basis guna mempermudah identifikasi faktor pendorong pertumbuhan di tiap kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya. Oleh karena itu penting untuk memberikan label terhadap sektor yang berperan vital bagi perekonomian dan sektor yang berperan sebagai pendukung ekonomi lokal. Kawasan Solo Raya sendiri memiliki beberapa sektor potensial yang dinilai mampu menjadi fokus utama dalam pertumbuhan ekonomi, diantaranya sektor industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan. Menurut analisis ILOR (*Incremental Labour Output Ratio*) wilayah pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2022, industri pengolahan di Kawasan Solo Raya memiliki kontribusi kurang lebih 30 persen dari total sektor lapangan usaha yang ada. Ini menunjukkan bahwa industri pengolahan menjadi salah satu sektor penting bagi keberlangsungan ekonomi di Solo Raya. Selain itu terdapat beberapa sektor lain yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi di Kawasan Solo Raya seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor perdagangan, sektor jasa keuangan dan asuransi, serta sektor jasa pendidikan dan beberapa sektor lainnya.

Keberadaan sektor-sektor ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong dalam aktivitas perekonomian suatu wilayah, diantaranya ada sektor

pertanian dan perdagangan yang menjadi salah satu sektor utama di Kawasan Solo Raya (Hesti, 2022). Pengembangan sektor potensial atau sektor basis yang ada di tiap daerah akan menjadi dasar dari pengembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah itu sendiri (Joshua et al., 2024). Kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya memiliki sektor basisnya masing-masing yang berfungsi sebagai roda penggerak perekonomian, Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar yang mengandalkan sektor industri pengolahan, listrik, kontruksi dan pengadaan jasa. Kabupaten Wonogiri yang berfokus pada sektor pertanian, lalu kabupaten lain seperti Sragen, Klaten, dan Boyolali dan mengutamakan sektor pendidikan dan pengelolaan limbah sebagai sektor unggulan. Kota Surakarta sebagai pusat Kawasan Solo Raya menjadikan sektor kontruksi dan jasa sebagai sektor basis pendorong utama perekonomian (Mudzakir et al., 2025).

Penetapan Solo Raya sebagai kawasan strategis kabupaten/kota di Jawa Tengah didasari oleh PERDA Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penetapan kawasan strategis ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui adanya hubungan timbal balik antar daerah dalam memenuhi kebutuhan dan juga kompetisi dari sektor unggulan masing-masing wilayahnya. Ketimpangan yang ada antar daerah pasti memiliki indikasi atau pertanda yang diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah penduduk suatu wilayah.

Gambar 1.3
PDRB Per Kapita ADHK di Kabupaten/Kota dalam Kawasan Solo Raya
Tahun 2019-2023



Sumber: (BPS, PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah), 2023, 2025)

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019-2023, diketahui perbedaan PDRB per kapita yang cukup signifikan antara Kota Surakarta dengan daerah di sekitarnya, dimana hanya Kota Surakarta saja yang memiliki PDRB perkapita di atas rata-rata Kawasan Solo Raya yaitu Rp70,9 juta sedangkan enam daerah lainnya meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten cenderung stagnan di bawah rata-rata. Kawasan Solo Raya sendiri memiliki rata-rata PDRB perkapita Rp32,5 juta. Kabupaten Wonogiri memiliki rata-rata PDRB per kapita terendah dibandingkan daerah lainnya yaitu Rp21,07 juta. Kota Surakarta yang memiliki rata-rata PDRB perkapita jauh diatas rata-rata PDRB perkapita dari Kawasan Solo Raya. Ini dilatarbelakangi oleh kemampuan Kota Surakarta dalam memaksimalkan sektor ekonomi yang dianggap memiliki peran penting dalam pembangunan wilayah.

Di Kawasan Solo Raya terjadi kesenjangan ekonomi antara wilayah pusat yakni Kota Surakarta dengan wilayah pendukungnya. Apabila dilihat dari daerah yang mendukung Kota Surakarta maka Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar memiliki PDRB Perkapita terbesar dengan masing-masing sebesar Rp30 juta dan Rp29 juta. Kemudian diikuti oleh daerah lain seperti Kabupaten Sragen Rp28 juta, Klaten Rp23 juta, Boyolali Rp22 juta, dan Wonogiri Rp21 juta. Perbedaan yang cukup signifikan ini diawali dengan adanya perbedaan kemampuan suatu daerah dalam mengatasi ketergantungan akan suatu sektor basis tanpa adanya dukungan dari sektor-sektor penyokong lainnya. Kabupaten Wonogiri cenderung bergantung pada sektor pertanian sebagai sektor primer tanpa adanya perkembangan pada sektor lainnya. Hal ini tentu berkebalikan dengan Kota Surakarta yang memiliki berbagai sektor utama misalnya seperti sektor jasa dan perdagangan dimana kedua sektor tersebut menjadi faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta.

Gambar 1.4
Rata-Rata PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023



Sumber: BPS (2025)

Berdasarkan Gambar 1.4, Kota Surakarta sebagai pusat kawasan strategis ini memiliki rata-rata PDRB jauh di atas 7 kabupaten lain, hal tersebut menunjukkan adanya tingkat kesenjangan yang cukup tinggi dengan daerah sekitarnya. Dan ini, justru tidak memenuhi tujuan dari dibentuknya kawasan strategis Solo Raya. Kesenjangan antar daerah ini dilatarbelakangi oleh perbedaan kemampuan dalam mengelola sektor potensial daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Menurut Peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), kawasan strategis dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Pengembangan Kawasan Solo Raya oleh pemerintah provinsi ditujukan sebagai wilayah pengembangan yang berfokus pada sektor industri, UMKM, perdagangan, dan jasa. Akan tetapi melihat fakta yang ada, nampaknya tujuan dari kawasan strategis ini masih belum terpenuhi melihat masih tingginya angka ketimpangan yang terjadi antara kota pusat dengan daerah-daerah sekitarnya. Umumnya sebuah daerah terbilang memiliki tingkat ketimpangan rendah apabila memiliki nilai indeks Williamson mendekati nol dimana hal ini belum terlihat pada kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya. Sesuai pada Gambar 1.4, daerah-daerah di kawasan ini dikategorikan sebagai kabupaten/kota dengan tingkat ketimpangan sedang.

Sebagai langkah awal untuk meminimalisir angka ketimpangan antar wilayah, diperlukan adanya identifikasi dan analisis terhadap potensi ekonomi yang dimiliki suatu wilayah. Hal ini dapat berupa sektor-sektor penunjang yang dinilai

memiliki kemampuan untuk bersaing dengan wilayah lainnya, baik di suatu sektor yang sama ataupun sektor yang berbeda. Sektor-sektor potensial inilah yang akan menjadi roda penggerak pertumbuhan ekonomi wilayah, terlebih lagi apabila sektor tersebut mampu dikelola secara efisien dan berkelanjutan sehingga menjadi sektor basis yang mampu diandalkan suatu wilayah untuk lebih memiliki keunggulan kompetitif di perekonomian.

Adanya identifikasi tersebut, daerah-daerah dalam kawasan yang sama akan memiliki dasar ekonomi yang kuat baik untuk mengembangkan wilayah mereka sendiri ataupun bersaing dengan wilayah lainnya. Kemudian dengan adanya pemahaman mengenai potensi yang dimiliki tiap daerah, akan membuka jalan menuju optimalisasi sumber daya yang mana hal ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama regional antar daerah di Kawasan Solo Raya dan mendorong pemerataan pembangunan kawasan strategis ini untuk kedepannya

Kawasan Strategis Solo Raya dipilih sebagai objek penelitian karena kawasan ini merepresentasikan struktur wilayah dengan karakteristik core-periphery, dimana Kota Surakarta berperan sebagai pusat pertumbuhan, sedangkan kabupaten di sekitarnya berperan sebagai wilayah hinterland (pendukung). Perbedaan rata-rata PDRB per kapita yang cukup signifikan antara Kota Surakarta dan kabupaten sekitarnya dalam Kawasan Solo Raya menunjukkan adanya indikasi konsentrasi aktivitas ekonomi pada area inti. Secara teoritis, kondisi ini berpotensi menimbulkan ketimpangan regional apabila efek penyebaran pertumbuhan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, Kawasan Solo Raya menjadi menarik untuk diteliti karena dapat menggambarkan bagaimana dinamika ketimpangan

terjadi dalam suatu kawasan strategis yang secara administratif telah dirancang untuk mendorong pemerataan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibuat sebuah kajian dan identifikasi lebih lanjut mengenai bagaimana kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya mengatasi tingkat ketimpangan yang ada sekaligus memaksimalkan sektor potensial yang dimiliki dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terbaru mengenai kondisi ketimpangan dan perkembangan perekonomian khususnya di Kawasan Solo Raya bagi penelitian-penelitian mendatang. Oleh karena itu, dipilih judul penelitian “**Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Sektor Potensial Dalam Kawasan Strategis Solo Raya Pada Periode 2019- 2023**”.

1.2 Rumusan Masalah

Solo Raya merupakan kawasan strategis di Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Surakarta sebagai pusatnya. Kawasan ini dikelilingi oleh beberapa kabupaten seperti Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Pembentukan kawasan strategis ini bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian yang memanfaatkan sumber daya dan modal yang dimiliki antar daerah sehingga dapat saling memenuhi kebutuhan masing-masingnya serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, masih ditemukan adanya kesenjangan dari berbagai sektor perekonomian antara Kota Surakarta sebagai pusat dengan kabupaten di sekitarnya, berdasarkan Gambar 5 terdapat perbedaan PDRB perkapita antara Kota Surakarta dengan 7 kabupaten lainnya dalam kawasan yang sama. Perbedaan rata-rata PDRB perkapita antara Kota Surakarta dengan

daerah sekitarnya cukup signifikan dimana hanya Kota Surakarta yang memiliki rata-rata jauh di atas rata-rata PDRB perkapita Kawasan Solo Raya. Inilah yang menjadi salah satu faktor pemicu adanya ketimpangan perekonomian di Kawasan Solo Raya sehingga menciptakan adanya kesenjangan antar wilayah.

Pemikiran tersebut yang menjadi dasar dari penelitian ini dimana perbedaan kemampuan masing-masing kabupaten/kota yang ada di Kawasan Solo Raya dalam mengelola dan mengembangkan sektor-sektor potensial guna meningkatkan daya saing ekonomi akan memengaruhi tingkat ketimpangan dan kesejahteraannya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat diangkat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Kawasan Strategis Solo Raya selama periode 2019–2023 berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil?
2. Sektor ekonomi apa saja yang menjadi sektor basis dan memiliki daya saing di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan analisis Location Quotient (LQ) dan Shift Share?
3. Sejauh mana keberadaan sektor basis tersebut berkontribusi terhadap pemerataan atau justru memperkuat konsentrasi pertumbuhan di wilayah tertentu dalam kawasan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian yang disesuaikan sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis tingkat dan perkembangan ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota di Kawasan Strategis Solo Raya selama periode 2019–2023.
2. Mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dan memiliki daya saing di masing-masing kabupaten/kota.
3. Menganalisis keterkaitan antara struktur sektor ekonomi dengan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah.

1.3.2 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kedalaman teori dan juga konsep mengenai pembangunan dan masalah ketimpangan terutama di daerah Surakarta dan sekitarnya serta menjadi referensi penelitian-penelitian selanjutnya dan juga bahan studi literatur tentang ketimpangan yang terjadi antar wilayah dan sektor unggulan tiap daerah.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga pemerintah daerah kota/kabupaten di Kawasan Solo Raya dalam melihat permasalahan ketimpangan dan menyusun kebijakan yang tepat sesuai dengan sektor unggulan masing-masing daerah dengan tujuan mengurangi angka ketimpangan dan

meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berikut ini adalah sistematika penulisan pada penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama dalam penelitian ini merupakan pendahuluan.

Bagian pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang masalah dan rumusan masalah dalam penelitian mencakup pentingnya pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dalam mengentaskan permasalahan disparitas antar daerah. Selain itu menjelaskan mengenai tujuan dari penulisan penelitian yang mencakup identifikasi sektor potensial dan pendukung yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka meminimalisir tingkat ketimpangan yang terjadi.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bagian telaah pustaka berisi teori-teori yang digunakan guna mendukung dan sekaligus menjadi landasan dalam penelitian, diantaranya yaitu teori pertumbuhan ekonomi, teori ketimpangan wilayah, dan teori potensi ekonomi. Bab ini juga merangkum beberapa penelitian terdahulu yang memiliki tema serupa sebagai referensi dan literatur pendukung penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bagian bab metode penelitian menjelaskan mengenai variabel- variabel yang digunakan beserta definisi operasional variabel penelitian. Bab ini juga menyuguhkan jenis dan sumber data yang digunakan, metode dalam pengumpulan data yang bersifat sekunder, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian seperti Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Location Quotient, dan Shift Share.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS

Bab keempat ini menggambarkan secara umum mengenai objek yang dibahas dalam penelitian, selain itu juga menjabarkan hasil analisis data dan interpretasi dari hasil analisis tersebut. Bab ini juga menjelaskan mengenai pembahasan dari hasil interpretasi analisis data yang telah dilakukan.

BAB V : PENUTUP

Bab kelima merupakan bab penutup sekaligus bab terakhir dari penelitian yang berisikan simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan juga saran.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pusat Pertumbuhan (Growth Pole Theory)

Menurut Francois Perroux, pertumbuhan ekonomi tidak terjadi secara merata di seluruh daerah melainkan terpusat pada beberapa wilayah yang memiliki keunggulan sumber daya dimana wilayah yang memiliki keunggulan akan menjadi pusat pertumbuhan dan berperan sebagai penggerak ekonomi kawasan (Mustika & Suhartini, 2024).

Beberapa daerah dapat mengalami pertumbuhan perekonomian yang akseleratif dan cenderung signifikan dimana hal ini mendorong perkembangan daerahnya, akan tetapi terdapat beberapa daerah yang memiliki keterbatasan baik dari segi sumber daya maupun modal yang ada dimana hal ini justru menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Pertumbuhan ekonomi wilayah sendiri terjadi apabila terdapat peningkatan pendapatan masyarakat di daerah sebagai akibat dari kenaikan nilai tambah secara keseluruhan di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi ini menyebar ke daerah lain melalui adanya keterkaitan ekonomi antar daerah dimana apabila keterkaitan yang ada cukup lemah maka pertumbuhan hanya akan terkonsentrasi di area pusat dan memperlebar ketidakmerataan.

Secara tidak langsung, pertumbuhan ekonomi ini menjadi tolak ukur dalam melihat kondisi perekonomian dalam periode waktu tertentu. Salah satu indikator penting dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) yang dalam hal ini digunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan tujuan melihat perkembangan ekonomi secara riil dimana tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga, inflasi, ataupun deflasi.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu (Haryanto, 2013). Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila pertambahan output dari proses perekonomian lebih besar dibandingkan pertambahan jumlah penduduk. Analisis pertumbuhan ekonomi sendiri memberikan jawaban bagaimana suatu daerah dapat tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah lainnya, selain itu juga mengidentifikasi penyebab terjadinya ketimpangan suatu wilayah atas wilayah lainnya. Dalam penelitian ini sendiri, Kota Surakarta sebagai area pusat merupakan *growth pole* sedangkan daerah sekitarnya merupakan daerah *hinterland* atau pendukung.

2.1.2 Ketimpangan Wilayah

Pembangunan ekonomi wilayah awalnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan membentuk struktur ekonomi, sistem sosial, menurunkan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan, dan tingkat pengangguran (Fahrizal et al., 2019). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah tingkat kesenjangan yang didasari atas pendapatan per kapita wilayah satu dengan wilayah lainnya. Ketimpangan tingkat pendapatan ini mempengaruhi tingkat kesejahteraan atau *welfare* suatu wilayah tersebut. Menurut Williamson, pertumbuhan ekonomi tidak selalu terjadi secara merata di semua wilayah dimana proses pembangunan cenderung berfokus pada beberapa area pusat suatu negara. Penyebaran pembangunan yang terjadi pun berkembang secara lambat dan *subsequent* ke

daerah-daerah pinggiran.

Dalam (Afifah et al., 2025) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor penentu terjadinya ketimpangan di suatu wilayah, diantaranya yaitu perbedaan cadangan sumber daya alam, perbedaan kondisi demografis, mobilitas yang terhambat, konsentrasi aktivitas ekonomi regional, dan alokasi dana pembangunan wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, tidak mengherankan apabila setiap daerah dapat dikategorikan daerah maju (*development region*) dan daerah tertinggal (*underdevelopment region*). Kesenjangan antar wilayah ini memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat antar wilayah, oleh karena itu penting bagi pemerintah dalam merencanakan kebijakan pembangunan berdasarkan realita yang ada di masyarakat.

Permasalahan ketimpangan sendiri telah menjadi bahasan utama beberapa peneliti seperti dalam pengembangan teori pertumbuhan neoklasik oleh Douglas C. North yang menekankan pada adanya beberapa tahapan pembangunan. Teori ini kemudian diuji oleh Williamson (1966) mengenai adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan wilayah. Ketimpangan yang terjadi pun tidak hanya memengaruhi distribusi pendapatan masyarakat, akan tetapi juga memengaruhi bagaimana pembangunan antar daerah dalam suatu wilayah (Sri Hartati, 2022). Ketimpangan yang terjadi merupakan ketidakseimbangan struktur spasial di dalam atau antar wilayah.

Teori Neoklasik menjelaskan bahwa di tahap awal pembangunan, ketimpangan akan cenderung meningkat dikarenakan pembangunan yang hanya berfokus pada area pusat saja dimana terkonsentrasinya pembangunan ini

dikarenakan suatu wilayah memiliki keunggulan komparatif. Ketimpangan yang terjadi ini akan terus meningkat hingga sampai ke puncak, apabila pembangunan terus berlanjut secara berkelanjutan maka angka ketimpangan perlahan akan menurun secara perlahan dikarenakan adanya pemerataan pembangunan (Maryanti, 2015).

2.1.3 Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Merupakan salah satu sektor yang digunakan dalam melihat keunggulan suatu aktivitas di suatu wilayah, dinamakan juga sektor basis. Suatu sektor dikatakan sektor basis apabila memiliki daya saing dan produktivitas tinggi yang secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan melalui aktivitas ekspor sektor unggulan tersebut. Sektor basis ini menjadi pendorong utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu daerah dimana semakin besar angka ekspor suatu daerah maka semakin maju pertumbuhan daerah tersebut (Basuki & Mujiraharjo, 2017). Selain itu, menambahkan permintaan ekspor akan menyebabkan adanya *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi. Efek tersebut memberikan pengaruh besar bagi pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Sebaliknya, sektor non basis (*city following*) merupakan sektor lain yang memiliki potensi cenderung kecil dan lambat untuk berkembang sehingga hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan di daerah itu saja.

Berdasarkan hal tersebut, disimpulkan bahwa hanya sektor unggulan saja yang dinilai mampu meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah secara signifikan melalui aktivitas ekspor. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Tarigan (2005) dimana laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah

ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor wilayah tersebut. Sektor unggulan sendiri menjadi determinan utama dalam pertumbuhan ekonomi wilayah karena menghasilkan pendapatan dari luar yang kemudian memicu terjadinya *multiplier effect* pada sektor non basis (Rusastra et al., 2002). Sektor non basis inilah yang menyediakan barang dan jasa dalam wilayah tersebut dikarenakan potensi dari sektor yang ada tidak terlalu besar apabila dibandingkan sektor yang menjadi unggulan.

Teori basis ekonomi yang digunakan dalam analisis berguna untuk menentukan sektor dan subsektor potensial di suatu wilayah. Sektor utama dan subsektor wilayah ini memiliki tugasnya masing-masing. Sektor utama berfungsi sebagai penghasil barang dan jasa utama untuk diperjualbelikan diluar wilayah sekaligus menjadi roda penggerak utama dalam perekonomian daerah. Sedangkan subsektor wilayah ditujukan untuk pemenuhan secara lokal dan membantu sektor utama dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antar sektor dimana perkembangan sektor utama atau basis akan mendorong pertumbuhan sektor non basis dan perekonomian wilayah secara menyeluruh.

2.1.4 Pengukuran Ketimpangan Wilayah

Ketimpangan atau disparitas antar wilayah biasanya terjadi karena beberapa faktor seperti demografi wilayah, distribusi pendapatan, ataupun tingkat pembangunan antar daerah. Pengukuran tingkat kesenjangan antar daerah ini bertujuan untuk melihat pemerataan pembangunan dan distribusi pendapatan antar wilayah serta meninjau aspek ekonomi yang dapat dikembangkan menjadi sektor basis wilayah. Menurut Sjafrizal (2014) dalam (Fahrizal et al., 2019), penting

mengukur ketimpangan yang terjadi antar wilayah, hal ini dikarenakan lebih mudah dalam memahami pola dan tren ketimpangan pembangunan yang ada. Williamson menegaskan bahwa ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat di awal pembangunan dikarenakan sifat pembangunan yang terkonsentrasi di wilayah tertentu dengan kualitas yang lebih baik dari segi infrastruktur ataupun sumber daya. Dalam membantu mengukur ketimpangan yang terjadi, Williamson merumuskan model berikut:

$$IW = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{f_i}{n}\right) (Y_i - \bar{Y})^2} \dots\dots\dots (2.1)$$

Keterangan:

IW : Indeks Williamson

f_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n : Jumlah penduduk keseluruhan (Kawasan Solo Raya)

Y_i : PDRB perkapita kabupaten/kota i

$\bar{Y}$: PDRB perkapita rata-rata keseluruhan (Kawasan Solo Raya)

Hasil dalam pengukuran Indeks Williamson memiliki makna dimana suatu daerah semakin merata secara pembangunan apabila indeks mendekati nol, sebaliknya apabila mendekati satu maka suatu daerah akan semakin timpang.

Metode lain yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesenjangan wilayah yaitu Indeks Entropi Theil. Penggunaan Indeks Theil ini memungkinkan adanya analisis ketimpangan yang dapat diuraikan menjadi ketimpangan dalam dan antar wilayah sehingga menampilkan gambaran yang lebih lengkap. Indeks Theil sendiri memiliki kelebihan dalam pengukuran yang terkonsentrasi pada kondisi

geografis dan perubahan pada pola industri (Afifah et al., 2025).

Pengukuran menggunakan Indeks Theil umumnya membandingkan proporsi pendapatan dengan ketimpangan itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini, digunakan PDRB per kapita dan jumlah penduduk sebagai pembanding. Ketimpangan akan dianggap semakin tinggi apabila terjadi ketidakseimbangan dalam proporsi pendapatan dengan jumlah penduduk itu sendiri. Tidak jauh beda dengan Indeks Williamson, Indeks Theil juga menggunakan interpretasi $0 < T < 1$ dimana semakin mendekati nol maka distribusinya cenderung merata sedangkan semakin pengukuran suatu daerah mendekati satu maka semakin tinggi angka ketimpangannya. Berikut rumus Indeks Theil pada umumnya:

$$IT = \sum_{i=1}^n \frac{Y_i}{Y} \ln \left(\frac{Y_i/Y}{P_i/P} \right) \dots\dots\dots (2.2)$$

Keterangan:

IT : Indeks Theil

Y_i : PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah i

Y : PDRB perkapita rata-rata keseluruhan (Kawasan Solo Raya)

P_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota wilayah i

P : Jumlah penduduk keseluruhan (Kawasan Solo Raya)

Indeks Theil sendiri dinilai sangat cocok digunakan dalam mengukur ketimpangan pendapatan regional (Aidar & Syahputra, 2015). Metode terakhir yaitu Indeks Gini yang lebih menekankan pada ketimpangan pendapatan penduduk menggunakan kurva Lorenz. Penggunaan kurva Lorenz ini menggunakan garis horizontal sebagai interpretasi dari persentase kumulatif penduduk, sedangkan

garis diagonal melambangkan garis pemerataan dimana semakin jauh garis kurva Lorenz dari garis diagonal maka semakin tinggi kesenjangan yang terjadi. Indeks Gini menggunakan patokan nol sampai satu dimana distribusi pendapatan dianggap semakin merata apabila koefisien gini semakin mendekati nol, begitupun sebaliknya.

2.1.5 Potensi Sektor Ekonomi Wilayah

Perekonomian dan pembangunan berkelanjutan menjadi fokus utama baik dalam lingkup nasional maupun regional. Kemampuan ekonomi yang berbeda antar wilayah dan persediaan sumber daya yang unik menjadi salah satu faktor pembeda dalam kemajuan dan perkembangan perekonomian wilayah. Hal ini sesuai dengan pendapat Sjafrizal dimana pertumbuhan ekonomi wilayah merupakan unsur utama pembangunan. Inilah yang menjadi dasar dari adanya teori keunggulan komparatif dan keunggulan absolut yang dicetuskan oleh David Ricardo dan Adam Smith dimana kedua teori tersebut membahas mengenai sektor yang dapat menjadi penopang perekonomian wilayah hanya saja dalam dua perspektif berbeda.

Teori keunggulan absolut menurut Adam Smith menekankan pada jumlah produksi barang atau jasa suatu wilayah yang jauh lebih banyak dan dominan dibandingkan wilayah lainnya sehingga wilayah dapat lebih berfokus pada sektor tersebut dan mengembangkan spesialisasi produk. Inilah yang mendorong adanya ekspor produk unggulan yang secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas ekonomi wilayah tersebut. Sektor penggerak utama ini dikembangkan menjadi sektor basis wilayah dalam perekonomian. Sedangkan teori keunggulan komparatif menurut David Ricardo berfokus pada produksi barang dan

jasa dengan *opportunity cost* rendah sehingga suatu wilayah dapat memiliki spesialisasi atas produk tertentu dan dapat melakukan aktivitas ekonomi dengan wilayah lain yang memiliki keunggulan komparatif berbeda (Kurniasari et al., 2025). Teori keunggulan komparatif cenderung efisien dalam memanfaatkan sumber daya dengan biaya peluang terendah sehingga tetap mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal.

Potensi ekonomi suatu wilayah perlu dimanfaatkan secara efektif dalam rangka meningkatkan kontribusinya dalam pertumbuhan ekonomi daerah (Naufal & Sumiyarti, 2019). Pertumbuhan ekonomi akan berkembang secara signifikan apabila kemampuan ekonomi yang dimiliki suatu wilayah dapat terus dikembangkan sebagai sumber penopang utama (Fahrizal et al., 2019). Teori keunggulan kompetitif sendiri menekankan pada pentingnya inovasi dan pengembangan kapasitas sumber daya lokal, hal ini menyanggah teori keunggulan komparatif David Ricardo yang hanya berfokus pada efisiensi produksi sektor ekonomi di biaya peluang terendah.

Suatu sektor penopang pertumbuhan wilayah disebut juga sektor unggulan atau sektor basis. Sektor basis berfokus pada aktivitas ekspor barang dan jasa yang dinilai memiliki nilai tambah bagi suatu wilayah. Kegiatan ekspor ini berperan besar dalam pembangunan wilayah dan meningkatkan pendapatan daerah. Sedangkan sektor non basis merupakan sektor yang bergerak pada pemenuhan dalam wilayah saja dan memberikan dukungan pada sektor basis. Sektor non unggulan ini dinilai tidak bisa berkembang melebihi kebutuhan lokal (Naufal & Sumiyarti, 2019).

Potensi yang dimiliki suatu wilayah dalam sektor perekonomian tentunya berbeda dan memiliki keunggulannya masing-masing. Dalam hal ini, dapat digunakan beberapa metode seperti Location Quotient, Shift Share, bahkan analisis regresi dalam mengidentifikasi potensi yang ada. Analisis Location Quotient (LQ) memberikan gambaran bagaimana suatu sektor di suatu wilayah memiliki spesialisasi lebih dibandingkan dengan wilayah yang lebih besar, mencakup regional atau nasional. Spesialisasi ini yang kemudian menjadikan suatu sektor sebagai penggerak utama perekonomian dan disebut juga sektor basis. Selain itu, LQ digunakan sebagai metode yang mengkualifikasikan sektor di suatu wilayah, sektor basis sebagai penggerak utama dan sektor non basis sebagai pendukung sektor basis dan kebutuhan lokal wilayah. Metode ini dinilai efektif dan terbilang sederhana dalam mengidentifikasi sektor basis maupun non basis (R. Jumiyanti, 2018). Hasil analisis Location Quotient memiliki dua intepretasi yaitu nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor basis, sedangkan $LQ < 1$ berarti sektor tersebut adalah sektor non basis.

Metode lain yang dapat digunakan dalam melihat potensi ekonomi yaitu analisis shift share. Analisis shift share bertujuan untuk mengidentifikasi kinerja perekonomian wilayah dan faktor yang memengaruhinya. Suatu sektor dibandingkan dengan sektor lain di wilayah yang sama sekaligus membandingkan perkembangan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Menurut analisis shift share, pertumbuhan ekonomi dibangun oleh tiga komponen utama, ketiga komponen tersebut meliputi: *national share* (N_{ij}), *proportional shift* (M_{ij}), dan *differential shift* (C_{ij}) yang mana ketiganya saling berkaitan. Komponen pertama,

national share atau disebut juga National Growth Component menggambarkan adanya perubahan produksi ataupun kesempatan kerja yang disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi suatu nasional di suatu wilayah. Kedua, *proportional shift* atau Industrial Mix Component adalah aktivitas pertumbuhan ataupun penurunan yang disebabkan oleh struktur industri wilayah ketika dibandingkan dengan struktur industri nasional. Ketiga, *differential shift* atau Competitive Effect Component yaitu gambaran perubahan yang disebabkan oleh adanya keunggulan kompetitif suatu wilayah jika dibandingkan dengan wilayah lain.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berbagai sumber penelitian terdahulu telah mengkaji perihal ketimpangan dan juga pembangunan suatu wilayah dimana setiap penelitian tersebut menyoroti pentingnya faktor ekonomi seperti PDRB dalam mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Sebagian besar hasil penelitian juga menunjukkan bahwa besaran angka PDRB dan juga total jumlah penduduk menjadi peran penting dalam pembangunan dan kesejahteraan suatu wilayah. Penggunaan PDRB dan jumlah penduduk ini didukung dengan keberadaan sektor-sektor ekonomi yang dinilai dapat menjadi faktor pembeda antar daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sayuti, M., & Suhendri, A. (2022) menunjukkan penggunaan variabel lain seperti kualitas SDM, kesehatan, investasi, infrastruktur, dan jumlah pengangguran dimana hasil studi tersebut menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat dan pekerja dimana tingkat pendidikan yang rendah akan memengaruhi

tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur dan nilai investasi yang berbeda antar daerah juga memengaruhi mobilitas dan ketersediaan fasilitas di suatu wilayah.

Pendekatan kuantitatif banyak digunakan dalam penelitian ini, dengan memanfaatkan data sekunder yang kemudian diolah dengan bantuan analisis Indeks Williamson dan Indeks Theil serta metode perhitungan Location Quotient dan Shift Share. Kesimpulannya, hasil dari penelitian-penelitian yang ada menunjukkan bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi wilayah merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan pemerataan di suatu wilayah, selain itu juga menjadi fondasi utama dalam mengukur tingkat ketimpangan antar wilayah.

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian (Penulis)	Tujuan Penelitian	Variabel Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi antar Wilayah kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. (Naibaho et al., 2020)	Menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar wilayah di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara dalam kurun waktu 5 tahun.	• Ketimpangan pembangunan antar wilayah • Pertumbuhan ekonomi antar wilayah • PDRB perkapita kabupaten/kota • Jumlah penduduk • PDRB provinsi	• Indeks Williamson (IW) • Tipologi Klassen	Ketimpangan yang terjadi di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara cenderung meningkat setiap tahunnya pada periode 2014-2018. Terdapat 3 daerah yang terindikasikan daerah maju dan tumbuh yaitu Kota Manado, Minahasa Utara, dan Minahasa Tenggara.
2	Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient dan Shift Share Analysis. (Pribadi, 2021)	Menganalisis daya saing ekonomi yang difokuskan pada perbandingan pertumbuhan ekonomi daerah dan membagi sektor ekonomi sesuai pangsa pasarnya. Selain itu juga	• PDRB Kabupaten Lampung Tengah • PDRB Provinsi Lampung tahun 2016-2020 • Sektor Ekonomi Kabupaten Lampung Tengah	• Location Quotient (LQ) • Dynamic Location Quotient (DLQ) • Shift Share	Beberapa sektor ekonomi seperti transportasi dan perdagangan serta informasi dan komunikasi dinilai memiliki potensi secara progresif. Sektor-sektor tersebut dianggap potensial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung di masa

		mengidentifikasi pertumbuhan suatu sektor cepat atau lambat.			mendatang.
3	Analisis Ketimpangan Pendapatan dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2010-2019 (Fitriyah & Prabowo, 2021)	Meneliti apakah terdapat ketimpangan antar kota di Provinsi Jawa Timur dan mengidentifikasi apa yang menjadi sektor basis suatu daerah. Selain itu juga mencari tahu apakah terdapat gejala <i>trickle down effect</i> pada tiap kota di Provinsi Jawa Timur.	• Ketimpangan pendapatan antar kota di Provinsi Jawa Timur • Sektor-sektor ekonomi • Pertumbuhan ekonomi	• Indeks Williamson (IW) • Tipologi Klassen • Location Quotient (LQ) • Shift Share	Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan yang terjadi antar kota di Provinsi Jawa Timur relatif tinggi. Diantara 9 kota yang ada, 4 diantaranya merupakan kota tertinggal dimana salah satunya yaitu Kota Probolinggo yang memiliki nilai LQ dan ketimpangan pendapatan tertinggi.
4	Analisis Tingkat Ketimpangan Pendapatan Regional di Pulau Lombok Tahun 2019-2020 (Sayuti & Suhendri, 2022)	Mengidentifikasi ketimpangan pendapatan antar wilayah di Pulau Lombok tahun 2019-2020.	• Tingkat ketimpangan pendapatan regional Pulau Lombok • Jumlah pengangguran • Tingkat Kesehatan • Kualitas SDM • Kualitas infrastruktur	• Indeks Williamson (IW)	Berdasarkan hasil penelitian, Pulau Lombok memiliki tingkat ketimpangan sedang dengan nilai Indeks Williamson 0,56 pada tahun 2019 dan 0,51 di tahun 2020.
5	Analisis Ketimpangan Ekonomi Dan Sektor Ekonomi Unggulan Di Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi. (Pambudi et al., 2022)	Mengidentifikasi tingkat ketimpangan dan sektor potensial di Kabupaten Muaro Jambi dalam periode 2016-2020	• Ketimpangan ekonomi • Sektor-sektor ekonomi	• Indeks Williamson (IW) • Static Location Quotient (SLQ) • Dynamic Location Quotient (DLQ)	Penggunaan metode analisis SLQ menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat beberapa sektor unggulan dalam rentang waktu 2016-2020 diantaranya yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, dan jasa lainnya. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa ketimpangan yang ada cenderung meningkat setiap tahunnya.
6	Analisis Potensi Sektor Ekonomi Pada Kabupaten	Mengidentifikasi sektor unggulan yang mampu	• PDRB kabupaten/kota DIY	• Location Quotient (LQ)	Setiap kabupaten/kota memiliki sektor unggulan berbeda dikarenakan nilai

	Dan Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. (Shinta Iffah Rosyidah, 2022)	mendorong pertumbuhan ekonomi, sektor yang memiliki potensi untuk berkembang pesat di kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.	Sektor-sektor ekonomi	- Shift Share - Tipologi Klassen	PDRB dan sumber daya yang berbeda tiap wilayah. Dalam setiap wilayah tersebut memiliki sektor yang dianggap mampu menjadi penopang pertumbuhan dan menghasilkan nilai ekspor, selain itu juga terdapat sektor yang berfungsi sebagai pendukung kebutuhan secara lokal.
7	Analisis Ketimpangan, Pola Pertumbuhan Ekonomidan Sektor Unggulan di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah. (Dzikri Ainun Faza et al., 2023)	Meneliti percepatan pembangunan ekonomi di Kawasan Kedungsepur dan juga ketimpangan pendapatan antar daerah di dalamnya, selain itu juga mengidentifikasi sektor unggulan yang ada	- Tingkat ketimpangan Kawasan Kedungsepur - Pertumbuhan ekonomi - Sektor-sektor ekonomi	- Indeks Williamson (IW) - Tipologi Klassen - Static Location Quotient (SLQ) - Dynamic Location Quotient (DLQ)	Tingkat ketimpangan di Kawasan Kedungsepur cenderung rendah namun terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Dalam pola pertumbuhan ekonominya, hanya Kota Semarang yang dikategorikan cepat maju dan tumbuh. Kawasan Kedungsepur memiliki 5 sektor yang dinilai potensial dalam 1 dekade terakhir.
8	Analysis of Leading Economic Sectors in Pekanbaru City (Fadhilah, 2023)	Mengidentifikasi sektor unggulan sebagai langkah perencanaan awal penetapan kawasan strategis dan ekonomi berkelanjutan.	- Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru - Sektor-sektor ekonomi	- Location Quotient (LQ) - Dynamic Location Quotient (DLQ) - Shift Share - Tipologi Klassen	Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan Kota Pekanbaru mencapai 13,3% dengan beberapa sektor seperti sektor industry pengolahan, penyediaan listrik dan gas, konstruksi, informasi dan komunikasi, serta sektor kesehatan dan kegiatan sosial mengalami kemajuan pesat. Tiga sektor utama seperti sektor penyediaan listrik dan gas, informasi dan komunikasi, serta kesehatan menjadi sektor unggulan yang sekaligus mendorong transformasi ekonomi di Kota Pekanbaru.
9	Analisis Ketimpangan Pembangunan dan	Mengidentifikasi sektor unggulan dan mengukur	- Peningkatan nilai tambah sektor - Nilai tambah	Indeks Williamson (IW)	Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, diperoleh

	Sektor Unggulan Provinsi DKI Jakarta. (Decky Subarja, 2024)	tingkat ketimpangan yang ada di DKI Jakarta	sektor i di tingkat daerah pada awal periode • Nilai tambah sektor i di tingkat daerah pada akhir periode • Nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada awal periode • Nilai tambah sektor i di tingkat nasional pada akhir periode	• Indeks Theil (IT) • Location Quotient (LQ) • Dynamic Location Quotient (DLQ) • Shift Share • Tipologi Klassen	hasil bahwa tingkat kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta relatif rendah. Didukung juga dengan hasil analisis Indeks Theil dimana tidak ditemukan adanya kecenderungan ketimpangan ekonomi yang lebih besar. Hasil analisis shift share juga menyimpulkan bahwa hamper seluruh sektor di DKI Jakarta bertumbuh relatif cepat. Penggunaan LQ dan DLQ juga menunjukkan di setiap kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta memiliki sektor unggulannya.
10	Studi Ketimpangan Wilayah dan Potensi Ekonomi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali. (Ernah et al., 2025)	Mengidentifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengklasifikasikan pola pertumbuhan yang ada di Kabupaten Badung, serta menganalisis tingkat disparitas yang terjadi antara Kabupaten Badung dengan daerah lainnya di Provinsi Bali.	• PDRB Perkapita kabupaten/kota • Jumlah Penduduk kabupaten/kota	• Location Quotient (LQ) • Indeks Williamson (IW) • Indeks Theil (IT) • Tipologi Klassen	Hasil analisis LQ menunjukkan jika pola pertumbuhan Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir termasuk ke sektor basis dengan keunggulan komparatif di 14 sektor lapangan usaha. Dengan analisis IW dan IT juga menunjukkan dalam lima tahun terakhir terdapat ketimpangan di Provinsi Bali yang bersifat fluktuatif sedangkan pada hasil tipologi Klassen menginterpretasikan bahwa rata-rata kabupaten termasuk daerah yang berkembang cepat.

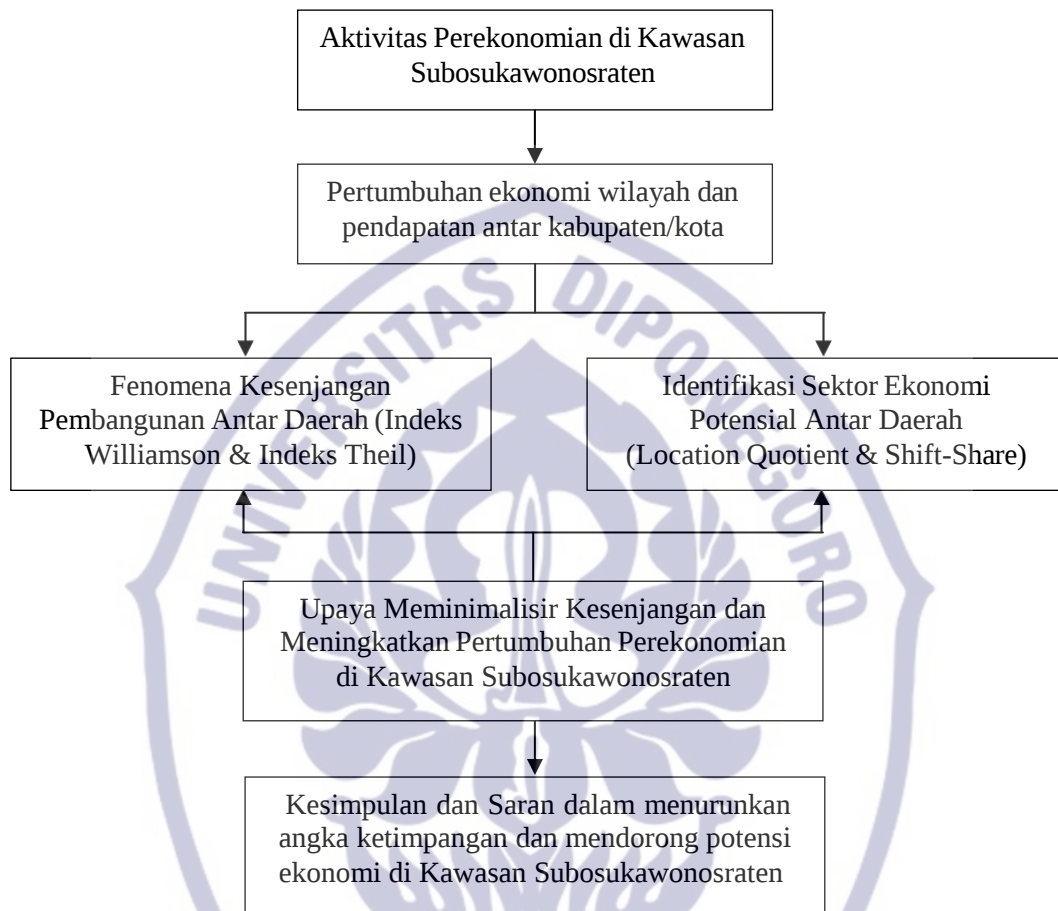
2.3 Kerangka Pemikiran

Ketimpangan pembangunan menjadi suatu topik yang sering diperbincangkan, melihat perbedaan secara jelas baik kesejahteraan masyarakat maupun ketersediaan infrastruktur di setiap wilayah sudah menggambarkan bagaimana ketidakseimbangan dalam pembangunan ekonomi. Ketidakseimbangan

ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya potensi sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Perbedaan potensi sumber daya ini menyebabkan munculnya daerah maju dan daerah tertinggal sehingga secara tidak langsung memengaruhi terjadinya ketimpangan antar wilayah. Penelitian ini menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Theil sebagai metode untuk mengidentifikasi tingkat ketimpangan yang terjadi di Kawasan Solo Raya. Setiap wilayah dalam Kawasan Solo Raya pastinya memiliki potensi sumber daya yang berbeda dimana hal ini dinilai menjadi faktor pendorong utama dalam mendukung perekonomian wilayah.

Sektor yang ada dibedakan menjadi sektor unggulan dan non unggulan sesuai pada metode Location Quotient dan Shift Share yang digunakan pada penelitian. Sektor unggulan atau basis dianggap mampu menopang perekonomian wilayah dengan kemampuan ekspor yang dinilai memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan wilayah lain dalam kawasan yang sama, sebaliknya dengan sektor non unggulan atau non basis dianggap sebagai sektor yang hanya mampu mendukung kebutuhan wilayah secara lokal. Selanjutnya dalam hasil analisis LQ dan Shift Share ini akan diperoleh kesimpulan dan memberikan pertimbangan yang tepat dalam meminimalisir tingkat ketimpangan dan mendorong potensi ekonomi yang ada sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Merupakan penjelasan setiap variabel yang digunakan dalam penelitian secara spesifik beserta indikator pengukuran dari variabel tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pertumbuhan ekonomi, PDRB, PDRB Perkapita, dan jumlah penduduk.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Merupakan perkembangan aktivitas perekonomian dalam masyarakat dimana jumlah barang dan jasa yang diproduksi mengalami pertumbuhan sehingga meningkatkan kemakmuran masyarakat. Menurut Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi terjadi ketika kegiatan ekonomi mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil bertambah. Pertumbuhan ekonomi menjadi sebuah penanda akan berkembangnya sebuah daerah atau wilayah dalam jangka panjang. Dalam penelitian ini, pertumbuhan ekonomi diukur dengan indikator persen.

3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah dari adanya suatu aktivitas ekonomi di suatu wilayah, nilai tambah yang ada dijumlahkan dari berbagai sektor hingga menghasilkan angka total output dari kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, besaran PDRB dihitung berdasarkan harga konstan dengan tahun dasar 2010 untuk Kabupaten/Kota

Kawasan Solo Raya dengan satuan rupiah.

3.1.3 PDRB Perkapita

PDRB Perkapita menunjukkan tingkat kemakmuran perekonomian di suatu wilayah dimana besaran angka PDRB Perkapita ini mencerminkan pendapatan rata-rata yang diterima oleh setiap penduduk dalam suatu wilayah. Angka inilah yang kemudian digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan sebuah wilayah. Semakin tinggi angka PDRB Perkapita pada suatu wilayah maka semakin sejahtera suatu wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan satuan rupiah sebagai indikator pengukuran PDRB Perkapita.

3.1.4 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk adalah banyaknya penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi objek penelitian. Jumlah penduduk ini menentukan besaran PDRB Perkapita yang dihasilkan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Penelitian ini menggunakan indikator jiwa dalam mengukur jumlah penduduk yang ada.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dari tujuh Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya dalam periode tahun 2019-2023. Sumber data yang digunakan diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan Solo Raya yang meliputi, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Selain itu dalam memenuhi kelengkapan data yang dibutuhkan, beberapa juga diambil dari penelitian-penelitian terdahulu. Berikut beberapa data yang

digunakan dalam penelitian ini:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023.
3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita di Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023.
4. Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023.
5. Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Metode ini mengumpulkan data dan sumber-sumber yang dinilai relevan dengan penelitian yang dilakukan. Beberapa sumber didapatkan dari badan atau instansi resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Sumber dari jurnal ataupun penelitian terdahulu juga dimanfaatkan sebagai referensi dalam penelitian.

3.4 Metode Analisis

Penelitian ini memanfaatkan metode perhitungan Indeks Williamson dan Indeks Theil dalam menganalisis terjadinya disparitas antar wilayah dalam Kawasan Solo Raya. Metode *Location Quotient* (LQ) dan juga Shift Share digunakan untuk melihat adanya sektor potensial antar wilayah di Kawasan Solo

Raya. Kedua metode tersebut bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian agar relevan dan sesuai fakta.

3.4.1 Analisis Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan yang terjadi antar wilayah dapat diukur dengan beberapa metode seperti Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil, Koefisien Gini, dan Koefisien Variasi. Dalam melihat ketersediaan data dan fakta yang ada, penelitian ini menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil yang dijabarkan sebagai berikut:

Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengukur tingkat ketimpangan yang terjadi dalam suatu wilayah melalui pendekatan koefisien variasi tertimbang dengan membandingkan variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita antar wilayah dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Rumus yang digunakan secara umum dalam Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

$$IW = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{f_i}{n} \right) (Y_i - \bar{Y})^2} \dots \dots \dots (3.1)$$

Keterangan:

IW : Indeks Williamson

f_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota i

n : Jumlah penduduk keseluruhan (Kawasan Solo Raya)

Y_i : PDRB perkapita kabupaten/kota i

$\bar{Y}$: PDRB perkapita rata-rata keseluruhan (Kawasan Solo Raya)

Dalam penggunaan Indeks Williamson, berlaku $0 < IW < 1$ atau kisaran nol hingga satu. Apabila besaran indeks mendekati nol maka tingkat ketimpangan diindikasikan rendah atau cenderung merata. Begitu pula sebaliknya, jika besaran indeks mendekati satu maka tingkat ketimpangan semakin tinggi. Indeks Williamson ini lebih berfokus dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah dengan berdasarkan pada output PDRB perkapita bukan distribusi pendapatan antar individu (Rahawarin, 2019).

Indeks Entropi Theil

Indeks Entropi Theil juga menggunakan PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai variabel dalam pengukurannya, hanya saja yang membedakannya dengan Indeks Williamson adalah Indeks Theil menggunakan distribusi pendapatan atau output antar wilayah sebagai dasar dalam pengukurannya. Rumus dasar yang digunakan dalam Indeks Theil ini yaitu:

$$IT = \sum_{n=1}^n \frac{Y_i}{Y} \ln \left(\frac{\frac{Y_i}{Y}}{\frac{P_i}{P}} \right) \dots\dots\dots (3.2)$$

Keterangan:

IT : Indeks Theil

Y_i : PDRB perkapita kabupaten/kota wilayah i

Y : PDRB perkapita rata-rata keseluruhan (Kawasan Solo Raya)

P_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota wilayah i

P : Jumlah penduduk keseluruhan (Kawasan Solo Raya)

Tidak jauh beda dengan Indeks Williamson, pengukuran dengan Indeks Theil terdapat dua indikasi dimana apabila nilai indeksnya kecil atau mendekati nol

maka cenderung terjadi pemerataan sedangkan jika nilai indeksnya semakin besar maka terjadi ketimpangan yang semakin besar pula. Indeks Theil sendiri tidak memiliki batas bawah ataupun atas seperti Indeks Williamson dan hanya digambarkan melalui semakin kecil atau besarnya nilai Indeks Theil tersebut.

Kelebihan penggunaan Indeks Theil ini memungkinkan adanya sudut pandang yang lebih konkrit dalam melihat fenomena kesenjangan pendapatan, kesenjangan pembangunan antar wilayah, tingkatan PDRB wilayah, dan distribusi dari produk domestik bruto. Penggunaannya membantu dalam membedakan ukuran kesenjangan antar wilayah (*intra region*) dengan ukuran kesenjangan dalam wilayah (*inter region*).

3.4.2 Analisis Potensi Ekonomi Wilayah

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam melihat potensi suatu daerah di sektor perekonomian dimana dalam penelitian ini menggunakan dua metode analisis yaitu analisis *Location Quotient* dan analisis Shift Share.

Analisis Location Quotient (LQ)

Metode analisis ini digunakan untuk melihat adanya sektor yang potensial dalam suatu wilayah dimana sektor inilah yang kemudian disebut sebagai sektor basis. Menurut Sabana (2007) dalam (Purwadinata et al., 2021), *Location Quotient* digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor ekonomi suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang jauh lebih besar. Selain untuk melihat sektor potensial yang ada, metode ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu wilayah. Rumus dari LQ yaitu sebagai berikut:

$$LQ = \frac{AB_{xy}/AB_y}{CD_{xy}/CD_y}$$

Keterangan:

LQ : Location Quotient

AB_{xy} : Nilai tambah sektor xy di kabupaten/kota

AB_y : PDRB di kabupaten/kota

CD_{xy} : Nilai tambah sektor xy di Kawasan Solo Raya

CD_y : PDRB di Kawasan Solo Raya

Dalam penggunaan LQ, terdapat beberapa kriteria pengukuran yang menjadi tolak ukur yaitu dimana nilai $LQ > 1$ maka sektor tersebut merupakan sektor potensial dan menjadi sektor basis suatu daerah, nilai $LQ < 1$ menunjukkan bahwa suatu sektor belum dapat memenuhi standar dan cenderung menjadi titik lemah suatu daerah sehingga perlu melakukan impor dari sektor tersebut. Terakhir, apabila $LQ = 1$ maka sektor tersebut memiliki peran yang seimbang.

Penerapan LQ ini terbilang sederhana dimana menurut Hood (1998) dalam (Haryanto, 2013), setiap daerah dengan keseluruhan sektor yang ada diidentifikasi untuk melihat sektor unggulan yang ada guna memicu pertumbuhan ekonomi. Metode *Location Quotient* memiliki beberapa kelebihan dan keterbatasan dalam penerapannya. Analisis LQ ini tidak memerlukan alat analisis rumit dan sederhana dalam pengaplikasiannya, namun diperlukan ketersediaan data yang lengkap dan akurat dimana hal ini cukup sulit untuk didapatkan terutama dalam observasi lapangan, oleh karena itu diperlukan sumber-sumber terpercaya baik dalam tingkat validitas data dan kelengkapannya.

Analisis Shift Share

Metode analisis Shift Share dicetuskan oleh Daniel B Creamer (1943) dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan dalam pertumbuhan dan perkembangan sektor perekonomian di beberapa wilayah berbeda (SaThierbach et al., 2015). Metode ini membantu dalam menunjukkan adanya hubungan yang relatif antara perkembangan suatu sektor di wilayah satu dengan perkembangan sektor lain di wilayah yang berbeda, selain itu juga dapat melihat apakah perkembangan perekonomian di suatu wilayah cenderung lambat atau cepat.

Terdapat beberapa tujuan dalam penggunaan analisis shift share dalam penelitian, diantaranya yaitu melihat peranan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, melihat peranan pertumbuhan ekonomi terhadap sektor lainnya, dan mengidentifikasi adanya perbedaan dan perubahan pada suatu sektor di wilayah tersebut. Kerangka analisis ini dicetuskan oleh Dunn, E.S. (1960) dimana dalam pemikirannya terdapat beberapa komponen penting yang meliputi diantaranya:

Pertumbuhan Nasional (National Growth Component)

Komponen ini menunjukkan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang lebih besar terhadap pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah tertentu. Dalam arti lain, seberapa besar pertumbuhan sektor di daerah tersebut dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh baik di tingkat nasional maupun regional. Komponen ini dapat disebut juga *national share* (Nij) atau *regional share*, dimana *share* ini merupakan gambaran dari adanya faktor eksternal yang mempengaruhi keseluruhan wilayah sehingga mendorong pertumbuhan.

Pertumbuhan Sektoral atau Bauran Industri (*Industrial Mix Component*)

Komponen ini memperlihatkan adanya pengaruh struktur komposisi ekonomi di wilayah tersebut terhadap pertumbuhan, dengan kata lain melihat apakah suatu sektor di suatu wilayah berkembang secara cepat atau lambat dalam lingkup nasional. Apabila suatu sektor berkembang pesat maka komponen tersebut dikatakan positif dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan wilayah tersebut. *Industrial mix* atau disebut juga *proportional shift* (Mij) menunjukkan adanya pertumbuhan yang disebabkan oleh struktur ekonomi wilayah yang menguntungkan.

Pertumbuhan Daya Saing (Competitive Effect Component)

Komponen ini mengukur sektor yang memiliki kemampuan daya saing di suatu wilayah untuk kemudian dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat nasional. Apabila komponen ini bernilai positif maka sektor tersebut memiliki keunggulan relatif dan mampu berkembang lebih pesat dibandingkan rata-rata nasional. Komponen ini disebut juga *differential shift* (Cij) yang mana menggambarkan keunggulan lokal suatu sektor yang ada.

Menurut Prasetyo Soepomo (1993) dalam (Wijaya, 2022), rumus umum dari analisis shift share beserta komponen-komponen dasarnya adalah sebagai berikut:

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij} \dots \dots \dots (3.4)$$

Keterangan:

Dij = Perubahan sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

Nij = Pertumbuhan regional sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

Mij = Bauran industry sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

Cij = Keunggulan kompetitif sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

Penelitian ini menggunakan jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang apabila diterapkan dalam analisis ini PDRB dilambangkan sebagai (y), maka:

$$D_{ij} = y_{*ij} - y_{ij} \dots \dots \dots (3.5)$$

$$N_{ij} = y_{ij} \cdot r_n \dots \dots \dots (3.6)$$

$$M_{ij} = y_{ij} (r_{in} - r_n) \dots \dots \dots (3.7)$$

$$C_{ij} = y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots \dots \dots (3.8)$$

Keterangan:

y_{*ij} = PDRB sektor i di daerah j akhir tahun analisis

y_{ij} = PDRB sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

y_{in} = PDRB sektor i di tingkat regional (Solo Raya)

y_n = Total PDRB semua sektor di tingkat regional (Solo Raya)

r_{ij} = Laju pertumbuhan sektor i di daerah j (kabupaten/kota)

r_{in} = Laju pertumbuhan sektor i di tingkat regional (Solo Raya)

r_n = Laju pertumbuhan PDRB di tingkat regional (Solo Raya)

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, setiap rumus tersebut digunakan untuk pengukuran yang memiliki tujuan tertentu dalam suatu wilayah, misalnya dalam menghitung persamaan shift share dari sektor i di wilayah j dapat menggunakan rumus di (3.6), bauran industri atau *proportional shift* di (3.7), dan keunggulan kompetitif di (3.8). Selain ketiga rumus dasar tersebut, terdapat rumus lain yang digunakan apabila ingin mengukur keseluruhan sektor yang ada di suatu wilayah, yaitu sebagai berikut:

$$D_{ij} = y_{ij} \cdot r_n + y_{ij} (r_{in} - r_n) + y_{ij} (r_{ij} - r_{in}) \dots \dots \dots (3.9)$$

Penerapan metode analisis shift share ini memang terbilang mudah dan sederhana, namun diperlukan kelengkapan data yang cukup akurat dan terbatas dalam mengidentifikasi faktor-faktor diluar model secara lebih lanjut. Selain itu, metode ini bisa dilakukan untuk melihat perubahan suatu wilayah setelah adanya ketersediaan data, sehingga hanya dapat digunakan dalam periode waktu tertentu dan tidak untuk jangka panjang.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Kawasan Solo Raya merupakan kawasan strategis di Provinsi Jawa Tengah yang sebagaimana diatur dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 dimana Solo Raya ditetapkan sebagai wilayah pengembangan strategis yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya antar daerahnya. Kawasan Solo Raya terdiri dari Kota Surakarta sebagai kota inti dan daerah sekitarnya sebagai kabupaten penyangga yang terdiri dari Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Kabupaten penyangga ini berperan penting dalam pengembangan kawasan metropolitan Solo Raya.

4.1.1 Kondisi Geografis Kawasan Solo Raya

Kawasan Solo Raya terdiri dari beberapa daerah dalam wilayah yang sama mencakup Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Klaten. Kota Surakarta sebagai kota inti memiliki beberapa kota satelit yang saling terintegrasi satu sama lain antara lain Kartasura, Solo Baru, Baki, Ngemplak, dan Colomadu. Kawasan Solo Raya sendiri berbatasan dengan Kabupaten Salatiga, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan di Utara, Kabupaten Magelang dan Daerah Istimewa Yogyakarta di Barat, Kabupaten Pacitan di Selatan, terakhir Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Timur. Kawasan strategis ini memiliki keunikan dimana Kota Surakarta sebagai kota inti hanya memiliki luas 46

km persegi dan dikelilingi oleh daerah-daerah penyangga yang rata-rata memiliki luas kurang lebih setengah dari luas Kota Surakarta itu sendiri.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kawasan Solo Raya (Solo Raya)



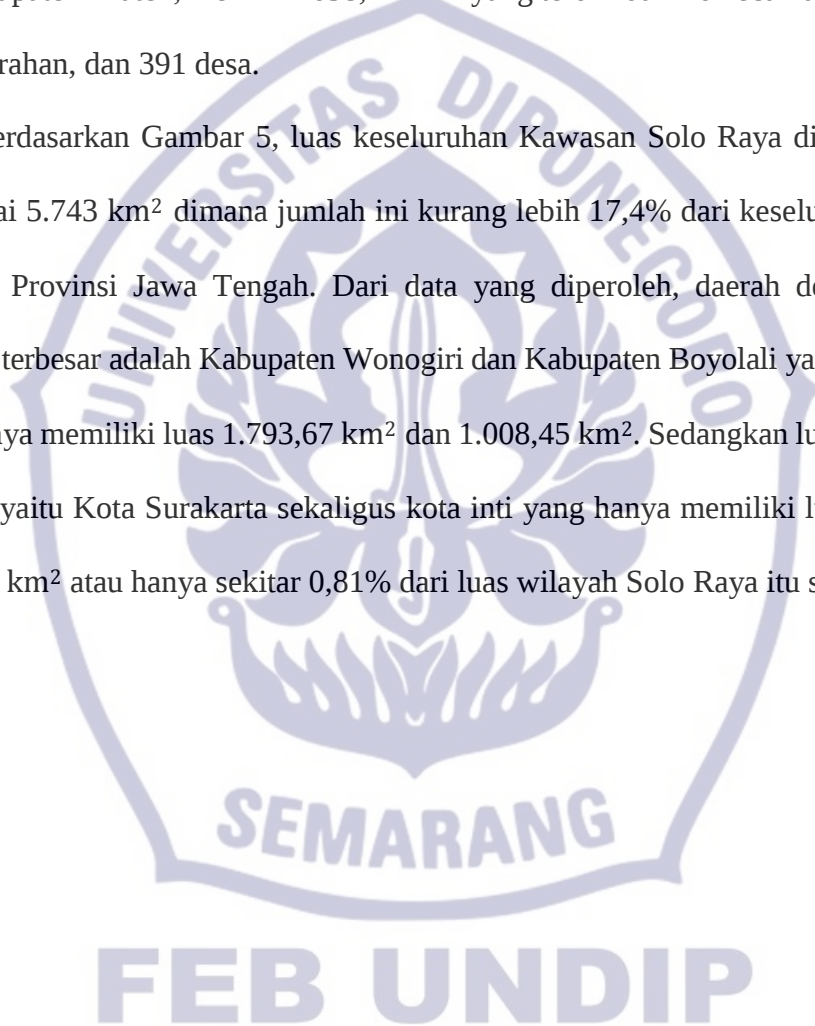
Sumber: Tribuntevel (2025)

Kawasan strategis Solo Raya ini terdiri dari 1 kota dan 6 kabupaten dengan cakupan administrasi sebagai berikut:

- a) Kota Surakarta, memiliki luas 46,01 km² yang terdiri dari 5 kecamatan dan 54 kelurahan.
- b) Kabupaten Boyolali, memiliki luas 1.008,45 km² yang terdiri dari 22 kecamatan, 6 kelurahan, dan 261 desa.
- c) Kabupaten Sukoharjo, memiliki luas 489,12km² yang terdiri dari 12 kecamatan, 17 kelurahan, dan 150 desa.
- d) Kabupaten Karanganyar, memiliki luas 775,44 km² yang terdiri dari 17 kecamatan, 15 kelurahan, dan 162 desa.

- e) Kabupaten Wonogiri, memiliki luas 1.793,67 km² yang terdiri dari 25 kecamatan, 43 kelurahan, dan 251 desa.
- f) Kabupaten Sragen, memiliki luas 941,54 km² yang terdiri dari 20 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa.
- g) Kabupaten Klaten, memiliki 658,22 km² yang terdiri dari 26 kecamatan, 10 kelurahan, dan 391 desa.

Berdasarkan Gambar 5, luas keseluruhan Kawasan Solo Raya diperkirakan mencapai 5.743 km² dimana jumlah ini kurang lebih 17,4% dari keseluruhan luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dari data yang diperoleh, daerah dengan luas wilayah terbesar adalah Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Boyolali yang masing-masingnya memiliki luas 1.793,67 km² dan 1.008,45 km². Sedangkan luas wilayah terkecil yaitu Kota Surakarta sekaligus kota inti yang hanya memiliki luas kurang lebih 46 km² atau hanya sekitar 0,81% dari luas wilayah Solo Raya itu sendiri.



Tabel 4.1
Luas Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	thdp Solo Raya	thdp Jawa Tengah
Surakarta	46,01	0,81	0,14
Boyolali	1008,45	17,65	3,07
Sukoharjo	489,12	8,56	1,49
karanganyar	775,44	13,57	2,36
Wonogiri	1793,67	31,40	5,47
Sragen	941,54	16,48	2,87
Klaten	658,22	11,52	2,01
Solo Raya	5712,45	100,00	17,42
Jawa Tengah	32.800,69		34,83

Sumber: BPS (2025)

Daerah-daerah dalam Kawasan Solo Raya sendiri berada di dataran rendah yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi seperti Gunung Merapi, Gunung Merbabu, dan Gunung Lawu, selain itu iklim tropis muson dan aliran sungai Bengawan Solo yang membentang dianggap berperan besar dalam mendukung sektor pertanian antar wilayahnya. Struktur kemiringannya yang rendah juga menjadi modal besar dalam mengembangkan infrastruktur perkotaan.

4.1.2 Kondisi Kependudukan Kawasan Solo Raya

Kawasan Solo Raya memiliki jumlah total keseluruhan 6.483.915 jiwa di tahun 2019 dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,33% hingga tahun 2023 dengan jumlah penduduk seluruhnya mencapai 6.829.229 jiwa. Pertumbuhan penduduk tertinggi dalam periode waktu 2019-2023 adalah Kabupaten Sragen yang mencapai 12,01% yang kemudian disusul oleh Kabupaten Wonogiri dan Boyolali yang masing-masingnya 11,52% dan 11,26% di periode waktu yang sama, sedangkan Kabupaten Klaten menjadi daerah dengan pertumbuhan penduduk terkecil yaitu -

2,96% yang menandakan bahwa hingga tahun 2023, jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Klaten justru menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 4.2
Kondisi Demografis Kawasan Solo Raya (Tahun 2019-2023)

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan	Luas Wilayah	Kepadatan Jiwa
	2019	2023			
Surakarta	519.587	526.870	1,40	46,01	11451
Boyolali	984.807	1.090.129	10,69	1008,45	1081
Sukoharjo	891.912	932.680	4,57	489,12	1907
karanganyar	886.519	955.116	7,74	775,44	1232
Wonogiri	959.492	1.051.085	9,55	1793,67	586
Sragen	890.518	997.485	12,01	941,54	1059
Klaten	1.174.986	1.284.386	9,31	658,22	1951
Solo Raya	6.307.821	6.837.751	8,40	5712,45	1197

Sumber: BPS (2025)

Berdasarkan tabel 4.2, Kota Surakarta menjadi wilayah yang memiliki tingkat kepadatan paling tinggi dan cukup jauh dibandingkan daerah sekelilingnya. Meskipun demikian, Kota Surakarta memiliki angka laju pertumbuhan yang terbilang cukup rendah yaitu 1,40% saja dimana angka tersebut cenderung kecil apabila dibandingkan dengan beberapa daerah lain seperti Kabupaten Sragen yang memiliki laju pertumbuhan sebesar 12,01% atau Kabupaten Wonogiri dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 11,52%. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Surakarta sendiri dipengaruhi oleh perannya sebagai kota pusat perekonomian di Kawasan Solo Raya sehingga banyak masyarakat dari daerah sekitarnya berdatangan dimana luas wilayahnya yang sangat kecil menjadi salah satu penyebab mengapa Kota Surakarta sangat padat penduduk. Berkebalikan dengan daerah-daerah di sekitarnya yang memiliki luas wilayah cukup besar namun tingkat kepadatannya rendah yang mana hal tersebut disebabkan oleh peran daerah tersebut yang hanya sebagai daerah penyokong.

4.1.3 Kondisi Ekonomi Kawasan Solo Raya

Perkembangan aktivitas perekonomian suatu wilayah salah satunya dapat dilihat dari tingkat Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya yang secara tidak langsung menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB di Kawasan Solo Raya terdiri dari PDRB beberapa kabupaten/kota di dalamnya, memperlihatkan bahwa setiap wilayahnya memiliki kontribusi dan memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi Kawasan Solo Raya itu sendiri.

Tabel 4.3
Kondisi Ekonomi Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	PDRB		Pertumbuhan (%)	Kontribusi (%)	
	2019	2023		2019	2023
Surakarta	35.441.108	40.620.314	14,61	18,92	19,00
Sragen	26.853.059	30.442.193	13,37	14,33	14,24
Wonogiri	20.856.209	23.566.879	13,00	11,13	11,02
Sukoharjo	27.076.443	30.661.917	13,24	14,45	14,34
Boyolali	22.681.098	26.334.296	16,11	12,11	12,32
Karanganyar	26.641.186	30.208.236	13,39	14,22	14,13
Klaten	27.805.994	31.938.327	14,86	14,84	14,94
Solo Raya	187.355.097	213.772.162	14,10	100	100

Sumber: BPS (2025)

Pada Tabel 4.3 terlihat bahwa pertumbuhan angka PDRB Kawasan Solo Raya sebesar 14,10% selama periode waktu 2019-2023. Pertumbuhan PDRB ini didukung dengan adanya perkembangan perekonomian di kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya dengan kontribusi terbesar yaitu Kota Surakarta sebesar 19% dan Kabupaten Klaten sebesar 14,94%. Meskipun demikian dalam periode yang sama, Kabupaten Boyolali menjadi daerah dengan pertumbuhan PDRB terbesar di Kawasan Solo Raya yaitu 16,11%. Menurut Badan Pusat Statistik Boyolali, pertumbuhan ini dilatabelakangi oleh pesatnya perkembangan sektor pengolahan di

tahun 2021 yaitu sebesar 30% dari total PDRB Boyolali itu sendiri, beberapa sektor lain seperti konstruksi, jasa kesehatan, kegiatan sosial, dan administrasi pemerintahan juga memiliki peran pendukung yang penting.

Secara keseluruhan, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Kawasan Solo Raya menunjukkan tren bagus kecuali di awal periode 2019-2020 dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Tahun 2020 menjadi pukulan telak bagi aktivitas perekonomian dan tingkat pertumbuhan ekonomi, karena bukannya mengalami peningkatan namun justru menurun jauh dari segi produktivitas dan output perekonomian sehingga menyebabkan angka negatif pada tingkat pertumbuhan PDRB Perkapita kabupaten/kota itu sendiri. Terlihat juga pada tabel 4.4, pertumbuhan PDRB perkapita kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya di tahun 2020 menurun jauh dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun di tahun berikutnya mulai membaik dan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu signifikan dan fluktuatif.

Tabel 4.4
Perkembangan PDRB Perkapita Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	PDRB Perkapita (%)					Rata-rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Surakarta	5,43	-2,29	3,94	6,20	4,80	3,62
Sragen	5,59	-10,50	3,04	4,84	4,67	1,53
Wonogiri	4,88	-9,31	2,74	4,86	5,58	1,75
Sukoharjo	8,30	-3,40	3,37	5,03	3,25	3,31
Boyolali	4,85	-8,44	3,89	5,37	4,64	2,06
Karanganyar	4,14	-6,80	2,83	4,88	4,71	1,95
Klaten	5,16	-7,88	3,27	5,19	5,00	2,15
Solo Raya	5,48	-7,43	3,27	5,16	4,71	2,24

Sumber: BPS (2025)

Pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Kawasan Solo Raya menggambarkan adanya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan

masyarakat. Terlihat pada tabel 4.4 dimana Kota Surakarta sebagai kota pusat perekonomian memiliki rata-rata pertumbuhan PDRB Perkapita tertinggi yaitu 3,62% diikuti oleh Kabupaten Sukoharjo dengan pertumbuhan 3,31% sedangkan disisi lain, Kabupaten Sragen menjadi daerah dengan pertumbuhan PDRB Perkapita terkecil yaitu 1,53% saja dalam periode waktu yang sama. Perbedaan ini secara tidak langsung menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan dan perbedaan kemampuan ekonomi setiap daerah di Kawasan Solo Raya.

4.2 Analisis Data

4.2.1 Ketimpangan Antar Daerah di Kawasan Solo Raya

Ketimpangan wilayah di Kawasan Solo Raya dapat dilihat dari perkembangan perekonomian dan pembangunan daerah yang ada, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh tingkat PDRB Perkapita dan juga pertumbuhan ekonomi antar daerah. Perbedaan tingkat pendapatan dan juga perkembangan perekonomian antar daerah ini yang menjadi indikasi dari adanya ketimpangan antar daerah. Besarnya ketimpangan antar daerah dapat diukur menggunakan dua metode yaitu Indeks Williamson dan Indeks Theil, keduanya menggunakan konsep dimana semakin besar angka indeks yang ada maka ketimpangan yang terjadi semakin tinggi, begitu pula sebaliknya apabila angka indeksnya semakin kecil maka ketimpangan yang ada cenderung rendah. Perbedaan diantara keduanya yaitu Indeks Theil tidak memiliki batas atas maupun batas bawah, tidak seperti Indeks Williamson yang memiliki batasan dalam pengukurannya yaitu 0 sampai 1.

Tabel 4.5
Pengukuran Ketimpangan Kawasan Solo Raya (Indeks Williamson)

Tahun	Ketimpangan
2019	0,3814
2020	0,4029
2021	0,4053
2022	0,4093
2023	0,4090
Rata-rata	0,4016

Sumber: Hasil penghitungan penulis

Berdasarkan tabel 4.5, ketimpangan yang terjadi di Kawasan Solo Raya berada di tingkat menengah. Meskipun demikian, terjadi kenaikan angka Indeks Williamson setiap tahunnya pada periode tahun 2019-2023 dimana hal ini mengindikasikan meningkatnya tingkat ketimpangan wilayah di Kawasan Solo Raya sendiri. Walaupun kenaikan indeks tidak terlalu signifikan setiap tahunnya, namun adanya peningkatan setiap tahun tersebut menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Solo Raya masih cukup mengkhawatirkan di tingkat menengah dengan rata-rata 0,4016.

Tabel 4.6
Pengukuran Ketimpangan Kawasan Solo Raya (Indeks Theil)

Tahun	Indeks
2019	0,0282
2020	0,0315
2021	0,0319
2022	0,0324
2023	0,0323
Rata-rata	0,0313

Sumber: BPS (2025)

Tidak jauh berbeda dengan hasil dari analisis Indeks Williamson, perhitungan Indeks Theil Kawasan Solo Raya juga mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata 0,0313 dimana dalam periode tahun 2020-2022 terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 0,0315 ke 0,0324 di akhir tahun 2022. Hal ini relevan dengan Indeks Williamson dimana semakin tinggi angka indeks yang ditunjukkan maka semakin tinggi pula ketimpangan yang terjadi di suatu wilayah.

Penggunaan metode analisis Indeks Theil dalam mengukur ketimpangan wilayah dinilai memiliki kelebihan baik dalam mengukur ketimpangan di dalam suatu wilayah maupun ketimpangan antar wilayah. Indeks Theil mampu memberikan hasil yang lebih detail dan terperinci dalam memahami faktor penyebab ketimpangan di suatu wilayah. Dalam membaca hasil perhitungan Indeks Theil sendiri cukup sederhana, hasil negatif (-) menandakan adanya kontribusi suatu daerah atau sektor dalam mengurangi angka ketimpangan yang terjadi, sedangkan hasil positif (+) berarti suatu daerah atau sektor tersebut justru menaikkan angka ketimpangan yang ada.

Tabel 4.7
Hasil Indeks Theil Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	Tahun 2021	2022	2023	Rata-rata
Surakarta	0,0683	0,0726	0,0733	0,0743	0,0745	0,0726
Sragen	0,0009	-0,0012	-0,0013	-0,0015	-0,0015	-0,0009
Wonogiri	-0,0151	-0,0161	-0,0163	-0,0164	-0,0159	-0,0160
Sukoharjo	0,0014	0,0040	0,0041	0,0040	0,0031	0,0033
Boyolali	-0,0134	-0,0140	-0,0138	-0,0137	-0,0138	-0,0137
karanganyar	0,0007	0,0011	0,0009	0,0007	0,0007	0,0008

Klaten	-0,0146	-0,0150	-0,0150	-0,0150	-0,0149	-0,0149
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Sumber: BPS (2025)

Tabel 4.7 menunjukkan adanya hasil negatif dan positif pada perhitungan Indeks Theil, beberapa daerah seperti Kabupaten Sragen, Wonogiri, Boyolali, dan Klaten memiliki rata-rata negatif dimana sesuai dengan interpretasi yang ada sebelumnya, keempat daerah ini memberikan kontribusi dalam menurunkan angka ketimpangan di Kawasan Solo Raya. Akan tetapi, nilai ini tidak mampu menutup besarnya nilai indeks positif yang dihasilkan oleh Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, dan Kabupaten Karanganyar. Kota Surakarta sendiri menjadi daerah yang menyumbang kontribusi ketimpangan terbesar di Kawasan Solo Raya dengan rata-rata nilai Indeks Theil 0,0726 dalam periode tahun 2019-2023 dan terus meningkat secara konsisten setiap tahunnya.

4.2.2 Potensi Perekonomian Kawasan Solo Raya

Analisis sektor-sektor perekonomian yang ada di kabupaten/kota Kawasan Solo Raya bertujuan untuk meninjau sektor mana yang dinilai memiliki potensi dalam mengembangkan sekaligus meningkatkan pembangunan di daerah dan sektor mana yang hanya berperan sebagai pendukung sektor utama. Penelitian ini memanfaatkan metode analisis *location quotient* dan analisis *shift-share* dalam mengklasifikasikan sektor potensial yang ada.

Location Quotient

Analisis location quotient atau LQ merupakan metode yang membandingkan besarnya peran suatu sektor di suatu daerah dengan sektor yang sama dalam skala yang lebih besar, dalam hal ini Kawasan Solo Raya. Metode analisis LQ umumnya menggunakan variabel Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

dan hasilnya menginterpretasikan suatu sektor disebut sektor basis dan nonbasis.

Nilai LQ dibedakan antara 1 dan 0 dengan pengertian apabila suatu sektor ekonomi menghasilkan nilai lebih besar dari 1 maka tingkat spesialisasi sektor tersebut di daerah lebih besar daripada spesialisasi sektor yang sama di tingkat nasional atau kawasan yang lebih besar. Sedangkan jika suatu sektor bernilai kurang dari 1 maka spesialisasi sektor ekonomi tersebut lebih rendah di daerah daripada spesialisasi sektor yang sama di tingkat nasional atau kawasan yang lebih besar. Sektor yang nilainya lebih dari 1 umumnya disebut sektor basis, sedangkan sektor yang nilainya kurang dari 1 disebut sektor non basis atau pendukung. Apabila dalam suatu daerah terdapat beberapa sektor basis maka dicari sektor yang nilai LQ nya paling tinggi karena hal ini menggambarkan sektor apa yang menjadi sektor paling potensial dalam mendorong perekonomian wilayah tersebut. Klasifikasi sektor basis dan non basis setiap kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya diperoleh sebagai berikut.

Tabel 4.8
Hasil Location Quotient Kota Surakarta Tahun 2019-2023

Sektor	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023		
A	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,03	Non basis
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Non basis
C	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	Non basis
D	1,53	1,55	1,56	1,57	1,59	1,56	Basis
E	2,06	2,09	1,97	1,92	1,91	1,99	Basis
F	2,50	2,53	2,45	2,39	2,28	2,43	Basis
G	1,29	1,27	1,27	1,27	1,27	1,28	Basis

H	0,79	0,47	0,47	0,62	0,60	0,59	Non basis
I	1,34	1,22	1,25	1,45	1,45	1,34	Basis
J	2,70	2,70	2,71	2,70	2,71	2,70	Basis
K	1,09	1,09	1,09	1,09	1,07	1,08	Basis
L	2,04	2,05	2,06	2,07	2,07	2,06	Basis
M, N	1,64	1,60	1,58	1,59	1,59	1,60	Basis
O	1,86	1,85	1,86	1,86	1,88	1,86	Basis
P	0,88	0,87	0,87	0,87	0,88	0,87	Non basis
Q	1,09	1,11	1,11	1,13	1,14	1,12	Basis
R, S, T, U	0,61	0,56	0,55	0,52	0,50	0,55	Non basis

Sumber: BPS (2025)

Berdasarkan tabel 4.8, dapat diidentifikasi bahwa Kota Surakarta memiliki cukup banyak sektor yang menjadi pendorong utama perekonomian, diantaranya terdapat 11 sektor basis yaitu sektor pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Sektor-sektor tersebut memiliki nilai LQ lebih dari 1 dengan yang terbesar yaitu sektor informasi dan komunikasi dengan nilai LQ sebesar 2,70. Selain itu ada sektor konstruksi dengan nilai LQ terbesar kedua yaitu 2,43. Kedua sektor tersebut menandakan bahwa peran keduanya dua kali lebih besar dari sektor serupa di Kawasan Solo Raya dimana hal inilah yang menjadikan keduanya sektor paling berpotensi untuk dikembangkan melihat bagaimana pertumbuhan dan kontribusi keduanya. Selain sektor basis, Kota Surakarta juga memiliki beberapa sektor non basis yang perannya sebagai pendukung dari sektor utama. Kota Surakarta sendiri memiliki 6 sektor non basis diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; jasa Pendidikan; dan jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut memiliki nilai LQ dibawah 1 dimana dalam hal ini perannya hanya terbatas pada pemenuhan di dalam Kota Surakarta itu sendiri.

Tabel 4.9
Hasil Location Quotient Kabupaten Boyolali Tahun 2019-2023

Sektor	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023		
A	1,68	1,67	1,68	1,66	1,67	1,67	Basis
B	2,16	2,20	2,12	2,20	2,13	2,16	Basis
C	1,00	1,03	1,04	1,03	1,05	1,03	Basis
D	0,16	0,15	0,15	0,15	0,16	0,16	Non basis
E	0,67	0,65	0,66	0,67	0,70	0,67	Non basis
F	0,65	0,64	0,67	0,66	0,68	0,66	Non basis
G	0,77	0,77	0,79	0,78	0,79	0,78	Non basis
H	1,32	1,21	1,14	1,32	1,33	1,26	Basis
I	0,79	0,81	0,78	0,76	0,77	0,78	Non basis
J	0,72	0,71	0,66	0,66	0,67	0,68	Non basis
K	0,70	0,70	0,72	0,72	0,74	0,72	Non basis
L	0,64	0,63	0,62	0,62	0,63	0,63	Non basis
M, N	0,83	0,83	0,83	0,83	0,84	0,83	Non basis
O	0,86	0,87	0,87	0,84	0,80	0,85	Non basis
P	1,13	1,13	1,17	1,17	1,12	1,14	Basis
Q	1,02	0,99	1,00	0,96	0,91	0,98	Non basis
R, S, T, U	1,16	1,13	1,13	1,10	1,10	1,12	Basis

Sumber: BPS (2025)

Pada tabel 4.9, diklasifikasikan bahwa Kabupaten Boyolali memiliki 6 sektor basis sebagai penggerak utama roda perekonomian daerah diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; transportasi dan pergudangan; jasa pendidikan; dan jasa lainnya. Sektor pertambangan dan penggalian menjadi salah satu sektor utama paling potensial melihat dari besaran angka LQ yang ada yaitu 2,16 dimana ini dilatarbelakangi oleh besarnya komoditas pasir dan batu di daerah tersebut. Sektor

lain yang tidak termasuk dalam sektor basis diklasifikasikan sebagai pendukung perekonomian karena kontribusinya yang tidak terlalu besar bagi pertumbuhan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan internal saja, terkecuali untuk sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial yang memiliki kemungkinan akan menjadi sektor basis dalam beberapa tahun mendatang melihat nilai LQ nya yang cukup besar dari lima tahun terakhir.

Tabel 4.10
Hasil Location Quotient Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019-2023

Sektor	Tahun					Rata-rata	KETERANGAN
	2019	2020	2021	2022	2023		
A	0,65	0,65	0,65	0,65	0,66	0,65	Non basis
B	0,21	0,21	0,20	0,20	0,18	0,20	Non basis
C	1,33	1,31	1,29	1,29	1,27	1,30	Basis
D	0,88	0,85	0,84	0,84	0,84	0,85	Non basis
E	0,47	0,47	0,48	0,49	0,50	0,48	Non basis
F	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	0,63	Non basis
G	1,01	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	Basis
H	1,02	1,09	1,11	1,06	1,05	1,07	Basis
I	1,05	1,06	1,04	0,98	0,97	1,02	Basis
J	1,10	1,15	1,18	1,19	1,20	1,16	Basis
K	1,11	1,11	1,11	1,12	1,13	1,11	Basis
L	1,24	1,24	1,24	1,23	1,24	1,24	Basis
M, N	0,85	0,89	0,89	0,88	0,88	0,88	Non basis
O	0,76	0,76	0,75	0,76	0,77	0,76	Non basis
P	0,77	0,76	0,76	0,77	0,78	0,77	Non basis
Q	0,97	0,99	0,98	0,97	0,98	0,98	Non basis
R, S, T, U	0,92	0,95	0,95	0,98	0,97	0,95	Non basis

Sumber: BPS (2025)

Sektor basis yang dimiliki Kabupaten Sukoharjo tidak terlalu banyak atau bahkan unggul jauh dibandingkan kabupaten lain, namun seperti yang terlihat pada tabel 4.10, daerah ini cukup mengandalkan sektor industri pengolahan dan real estatnya dengan masing-masing nilai LQ sebesar 1,30 dan 1,24. Kedua sektor tersebut dinilai mampu menjadi salah satu sektor pendorong perekonomian di

Kabupaten Sukoharjo melihat nilai LQ keduanya yang cukup tinggi dibandingkan sektor lainnya di daerah yang sama. Selain itu sektor basis lain seperti perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; serta jasa keuangan dan asuransi menjalankan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 4.11
Hasil Location Quotient Kabupaten Karanganyar Tahun 2019-2023

Sektor	Tahun					Rata-rata	KETERANGAN
	2019	2020	2021	2022	2023		
A	1,01	1,01	1,01	1,02	1,01	1,01	Basis
B	0,60	0,60	0,60	0,57	0,58	0,59	Non basis
C	1,57	1,58	1,57	1,57	1,57	1,57	Basis
D	1,17	1,15	1,14	1,14	1,14	1,15	Basis
E	0,98	0,98	1,03	1,05	1,03	1,01	Basis
F	0,67	0,65	0,67	0,67	0,69	0,67	Non basis
G	0,68	0,68	0,69	0,69	0,69	0,68	Non basis
H	0,76	0,94	0,94	0,92	0,92	0,90	Non basis
I	0,92	0,93	0,94	0,93	0,94	0,93	Non basis
J	0,32	0,31	0,31	0,31	0,29	0,31	Non basis
K	1,09	1,08	1,08	1,08	1,09	1,09	Basis
L	0,92	0,93	0,92	0,92	0,91	0,92	Non basis
M, N	0,81	0,82	0,82	0,82	0,83	0,82	Non basis
O	0,66	0,66	0,66	0,66	0,64	0,66	Non basis
P	0,80	0,81	0,81	0,81	0,79	0,80	Non basis
Q	0,84	0,83	0,82	0,82	0,83	0,83	Non basis
R, S, T, U	0,97	0,98	0,99	1,03	1,13	1,02	Basis

Sumber: BPS (2025)

Pada tabel 4.11 diperlihatkan bahwa Kabupaten Karanganyar memiliki 6 sektor basis sebagai penunjang aktivitas perekonomian daerahnya, diantaranya yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; jasa

keuangan dan asuransi; dan jasa lainnya. Sektor industri pengolahan menjadi sektor paling berpotensi untuk dikembangkan melihat Riwayat perhitungan LQ dari tahun ke tahun yang stabil dengan rata-rata sebesar 1,57. Selain itu terdapat beberapa sektor non basis yang berpotensi menjadi sektor unggulan dalam beberapa tahun kedepan melihat produktivitas dan perhitungan LQ nya selama lima tahun terakhir yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor real estate dimana keduanya menunjukkan besaran angka yang hampir menyentuh 1 dalam kurun waktu 2019-2023.

Berdasarkan analisis LQ pada tabel 4.12, diperoleh klasifikasi adanya 7 sektor basis di Kabupaten Wonogiri dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi di Wonogiri dengan angka LQ sebesar 2,35 yang diikuti oleh sektor transportasi dan pergudangan dengan besaran nilai LQ 2,10. Sektor pertambangan dan penggalian juga menjadi salah satu sektor penting dengan angka sebesar 1,68. Beberapa sektor basis lain seperti sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya juga memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Kabupaten Wonogiri meskipun kontribusi yang diberikan tidak sebesar tiga sektor sebelumnya. Di sisi lain terdapat 10 sektor non basis yang hanya berperan sebagai pendukung dan sarana dalam memenuhi kebutuhan daerah dalam lingkup kecil saja.

Tabel 4.12
Hasil Location Quotient Kabupaten Wonogiri Tahun 2019-2023

Sektor	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023		
A	2,30	2,34	2,35	2,39	2,38	2,35	Basis

B	1,71	1,67	1,70	1,65	1,69	1,68	Basis
C	0,55	0,57	0,58	0,58	0,59	0,58	Non basis
D	0,56	0,58	0,58	0,57	0,56	0,57	Non basis
E	0,92	0,92	0,96	0,96	0,99	0,95	Non basis
F	0,71	0,71	0,73	0,70	0,71	0,71	Non basis
G	0,99	1,02	1,01	1,00	1,00	1,01	Basis
H	2,11	2,18	2,25	1,94	2,00	2,10	Basis
I	0,70	0,74	0,72	0,66	0,69	0,70	Non basis
J	0,25	0,24	0,25	0,25	0,25	0,25	Non basis
K	0,98	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	Non basis
L	0,41	0,41	0,41	0,40	0,40	0,40	Non basis
M, N	0,91	0,93	0,95	0,94	0,96	0,94	Non basis
O	0,99	0,99	0,99	0,99	1,00	0,99	Non basis
P	1,29	1,29	1,27	1,26	1,30	1,28	Basis
Q	1,05	1,04	1,06	1,08	1,10	1,07	Basis
R, S, T, U	1,25	1,30	1,32	1,27	1,28	1,29	Basis

Sumber: BPS (2025)

Pada tabel 4.13 terlihat bahwa Kabupaten Sragen berfokus pada sektor pertanian dan pertambangan dalam tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Sragen memiliki besaran angka LQ cukup stabil dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan masing-masingnya sebesar 1,14 dan 1,41. Sektor basis lain seperti sektor industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; dan jasa lainnya memiliki peran pentingnya walaupun kontribusi yang diberikan tidak terlalu signifikan sebagai suatu sektor unggulan daerah namun perkembangannya dalam lima tahun terakhir terbilang cukup stabil.

Sektor non basis yang ada cukup banyak untuk dapat menjalankan perannya sebagai pendukung sektor utama, namun terdapat beberapa sektor non basis yang diharapkan dapat menjadi sektor basis dalam beberapa tahun kedepan melihat rata-

rata besaran nilai LQ nya dalam lima tahun terakhir yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor jasa perusahaan dimana keduanya memiliki rata-rata sebesar 0,93 dan 0,98 yang diharapkan dalam beberapa tahun mendatang keduanya dapat menjadi salah satu sektor basis yang mampu mendukung pertumbuhan perekonomian Kabupaten Sragen.

Tabel 4.13
Hasil Location Quotient Kabupaten Sragen Tahun 2019-2023

Sektor	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023		
A	1,16	1,14	1,13	1,13	1,13	1,14	Basis
B	1,41	1,41	1,43	1,39	1,41	1,41	Basis
C	1,22	1,22	1,23	1,25	1,25	1,23	Basis
D	1,08	1,05	1,04	1,04	1,02	1,05	Basis
E	0,88	0,85	0,88	0,89	0,88	0,88	Non basis
F	0,65	0,64	0,66	0,65	0,66	0,65	Non basis
G	1,13	1,15	1,14	1,15	1,15	1,14	Basis
H	0,74	0,87	0,87	0,80	0,79	0,81	Non basis
I	0,92	0,97	0,96	0,90	0,90	0,93	Non basis
J	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34	Non basis
K	0,88	0,88	0,87	0,86	0,87	0,87	Non basis
L	0,50	0,50	0,50	0,49	0,49	0,50	Non basis
M, N	0,98	0,99	0,99	0,98	0,98	0,98	Non basis
O	0,73	0,74	0,74	0,75	0,75	0,74	Non basis
P	0,87	0,87	0,87	0,87	0,88	0,87	Non basis
Q	0,78	0,79	0,79	0,80	0,80	0,79	Non basis
R, S, T, U	1,09	1,10	1,10	1,11	1,10	1,10	Basis

Sumber: BPS (2025)

Tabel 4.14
Hasil Location Quotient Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Sektor	Tahun					Rata-rata	Keterangan
	2019	2020	2021	2022	2023		
A	0,87	0,87	0,86	0,85	0,85	0,86	Non basis
B	1,56	1,54	1,57	1,61	1,61	1,58	Basis
C	1,19	1,18	1,18	1,17	1,17	1,18	Basis
D	1,22	1,26	1,28	1,28	1,27	1,26	Basis

E	0,64	0,64	0,67	0,68	0,67	0,66	Non basis
F	0,61	0,61	0,64	0,73	0,81	0,68	Non basis
G	0,99	0,97	0,97	0,97	0,96	0,97	Non basis
H	0,64	0,72	0,71	0,73	0,71	0,70	Non basis
I	1,07	1,10	1,12	1,05	1,03	1,07	Basis
J	0,82	0,80	0,79	0,79	0,76	0,79	Non basis
K	1,07	1,08	1,08	1,08	1,06	1,07	Basis
L	0,74	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	Non basis
M, N	0,74	0,73	0,73	0,73	0,71	0,73	Non basis
O	0,85	0,84	0,84	0,83	0,84	0,84	Non basis
P	1,38	1,37	1,37	1,36	1,36	1,37	Basis
Q	1,23	1,21	1,20	1,20	1,20	1,21	Basis
R, S, T, U	1,21	1,20	1,20	1,20	1,16	1,19	Basis

Sumber: BPS (2025)

Tabel 4.14 diatas menunjukkan adanya 8 sektor basis di Kabupaten Klaten yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut yang terdiri dari sektor pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Di antara sektor non basis yang ada, terdapat satu sektor yang dinilai mampu berkembang menjadi sektor basis untuk beberapa waktu kedepan yaitu sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor dimana nilai LQ yang dihasilkan dalam kurun waktu 2019-2023 cukup tinggi dengan rata-rata sebesar 0,97. Sektor-sektor non basis lainnya seperti sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan serta sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib juga memiliki besaran angka yang terhitung cukup tinggi untuk klasifikasi sektor pendukung dengan rata-rata nilai LQ sebesar 0,86 dan 0,84 masing-masingnya.

Shift-Share

Analisis Shift Share digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sektor penyebab pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah atau daerah yang lebih kecil terhadap wilayah yang jauh lebih besar. Umumnya analisis ini memiliki kegunaan dalam melihat kinerja suatu sektor ekonomi di suatu wilayah apakah pertumbuhannya cepat dan melampaui rata-rata keseluruhan atau justru cenderung lambat dan berada di bawah rata-rata total. Selain itu, shift share juga dapat digunakan untuk melihat adanya pergeseran struktur ekonomi daerah menuju kearah perkembangan atau justru penurunan. Perkembangan perekonomian dan pertumbuhan kinerja sektor ekonomi dipengaruhi oleh tiga hal yaitu *national share/regional share* (Nij) tergantung lingkup wilayahnya, *proportional shift* (Mij), dan *differential shift* (Cij). Ketiganya memiliki perbedaan dalam perhitungan dan kesimpulan yang dihasilkan. Berikut analisis shift share di Kawasan Solo Raya sekaligus identifikasi sektor-sektor ekonomi yang dinilai memiliki kelebihan dan juga menjadi kekurangan di tiap kabupaten/kota.

Tabel 4.15
Analisis Perhitungan *National Share* (Nij) Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sektor	Kota Surakarta	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Sragen	Kabupaten Klaten
A	8.658,97	272.556,52	126.227,04	192.860,28	342.950,63	221.959,17	173.144,53
B	10,99	47.458,34	5.441,72	15.457,76	34.617,31	36.531,40	41.871,75
C	160.358,20	391.992,35	617.746,87	721.324,33	198.626,33	563.883,17	568.607,50
D	4.717,79	313,29	2.060,47	2.713,29	1.014,09	2.530,93	2.940,58
E	3.493,93	723,97	604,52	1.242,90	913,24	1.129,26	847,50
F	538.353,59	89.186,28	103.489,89	108.936,11	90.551,86	105.876,59	103.211,75
G	486.010,75	186.585,30	291.863,72	192.466,85	220.304,02	323.959,39	291.627,70
H	61.063,00	65.287,16	60.225,73	44.328,49	96.083,05	43.631,83	38.899,44
I	104.236,88	39.498,47	62.119,31	53.628,13	31.974,35	54.134,57	65.058,07
J	319.473,10	54.276,54	99.545,06	28.283,12	17.288,41	31.222,58	75.987,81

K	69.988,31	28.796,85	54.616,48	53.026,50	37.213,48	43.111,33	54.216,59
L	87.460,89	17.655,27	40.673,39	29.860,84	10.317,14	16.278,39	24.881,21
M, N	16.624,62	5.368,30	6.560,45	6.165,39	5.436,90	7.502,72	5.887,46
O	106.644,17	31.367,55	33.312,71	28.412,42	33.207,35	31.743,41	37.995,24
P	88.587,84	73.290,85	59.678,28	61.148,53	76.612,29	66.357,59	109.149,64
Q	22.455,23	13.537,14	15.347,71	12.997,36	12.804,49	12.289,35	19.920,80
R, S, T, U	21.139,30	25.571,73	24.301,33	25.180,92	25.457,64	28.441,35	32.780,50
TOTAL	2.099.277,57	1.343.465,91	1.603.814,68	1.578.033,21	1.235.372,58	1.590.583,04	1.647.028,06

Sumber: BPS (2025)

Tabel 4.15 menunjukkan pertumbuhan sektor ekonomi di kabupaten/kota dalam Kawasan Solo Raya yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi nasional/regional. Perhitungan *national share* (Nij) sendiri membutuhkan komponen pertumbuhan total ekonomi Kawasan Solo Raya yang kemudian dikalikan dengan PDRB kabupaten/kota di tahun awal penelitian. Berdasarkan tabel tersebut diperoleh kesimpulan bahwa sektor-sektor yang ada mengalami perkembangan positif sehingga memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional Solo Raya secara positif. Beberapa sektor yang memberikan rata-rata kontribusi pertumbuhan terbesar di Kawasan Solo Raya adalah sektor industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; dan pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sedangkan sektor-sektor yang dinilai memiliki pertumbuhan regional terendah adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; pengadaan listrik dan gas; dan jasa perusahaan. Kota Surakarta sebagai area pusat cukup mendominasi dalam pertumbuhan regional beberapa sektor kecuali beberapa sektor yang mengandalkan pertanian dan juga penggalan serta jasa lainnya.

Tabel 4.16
Analisis Perhitungan *Proportional Shift* (Mij) Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sektor	Kota Surakarta	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Sragen	Kabupaten Klaten
A	192,43	6.056,94	2.805,10	4.285,87	7.621,28	4.932,53	3.847,74
B	-0,18	-758,20	-86,94	-246,95	-553,05	-583,63	-668,95
C	7.504,93	18.345,66	28.911,20	33.758,74	9.295,92	26.390,33	26.611,43
D	214,52	14,25	93,69	123,38	46,11	115,08	133,71
E	-17,55	-3,64	-3,04	-6,24	-4,59	-5,67	-4,26
F	15.744,18	2.608,26	3.026,57	3.185,84	2.648,19	3.096,37	3.018,43
G	20.867,44	8.011,26	12.531,51	8.263,79	9.459,01	13.909,58	12.521,38
H	45.769,84	48.936,06	45.142,26	33.226,47	72.019,16	32.704,29	29.157,12
I	23.716,48	8.986,89	14.133,69	12.201,73	7.274,96	12.316,96	14.802,33
J	6.766,49	1.149,59	2.108,38	599,04	366,17	661,30	1.609,43
K	1.116,48	459,38	871,27	845,90	593,65	687,73	864,89
L	4.243,66	856,65	1.973,50	1.448,87	500,59	789,84	1.207,25
M, N	952,94	307,72	376,05	353,41	311,65	430,06	337,48
O	1.608,84	473,21	502,56	428,63	500,97	478,88	573,20
P	1.987,83	1.644,58	1.339,13	1.372,12	1.719,11	1.489,00	2.449,22
Q	498,33	300,42	340,60	288,44	284,16	272,73	442,09
R, S, T, U	2.362,69	2.858,10	2.716,11	2.814,42	2.845,35	3.178,83	3.663,81
TOTAL	133.529,38	100.247,10	116.781,64	102.943,45	114.928,65	100.864,21	100.566,30

Sumber: BPS (2025)

Proportional shift (Mij) menganalisis adanya pergeseran atau perubahan struktur industri wilayah dengan melihat adanya nilai positif ataupun negatif pada sektor-sektor ekonomi. Pada tabel 4.16 terlihat bahwa di kabupaten/kota Kawasan Solo Raya terdapat 2 sektor yang memiliki nilai negatif yaitu sektor Pertambangan dan penggalan serta sektor Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dimana ini menandakan kedua sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang cenderung lambat. Sedangkan 15 sektor sisanya yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan,

pertahanan, dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya menunjukkan nilai positif yang artinya sektor-sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang relatif cepat di Kawasan Solo Raya.

Tabel 4.17 memperlihatkan analisis *differential shift* (Cij) yang mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif. Analisis ini diperoleh dari tingkat pendapatan tiap sektor yang ada kemudian dikurangi dengan tingkat pertumbuhan pendapatan Solo Raya, kemudian dikalikan dengan tingkat pertumbuhan pendapatan di kabupaten/kota yang dianalisis. Apabila suatu sektor memiliki nilai positif maka sektor tersebut memiliki keunggulan komparatif dan kemampuan bersaing dibandingkan sektor yang sama di Solo Raya. Sedangkan sektor yang bernilai negatif berarti kurang memiliki daya saing dan perkembangannya cenderung lambat.

Tabel 4.17
Analisis Perhitungan *Differential Shift* (Cij) Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sektor	Kota Surakarta	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Sragen	Kabupaten Klaten
A	19.136,92	-287.071,43	129.563,04	-31.267,89	457.179,03	73.232,39	116.504,45
B	-79,93	-47.540,88	-6.656,04	3.525,16	17.443,13	33.252,42	69.936,06
C	165.151,90	-1.025.855,46	305.165,53	-727.084,97	518.025,30	1.062.421,15	766.611,71
D	14.669,02	-933,19	2.772,71	-2.705,29	2.229,09	2.342,49	9.721,46
E	-380,50	-1.633,15	1.489,48	510,87	2.158,96	1.116,52	1.925,32
F	-161.670,40	-232.791,98	113.002,08	-181.741,55	94.911,92	142.246,92	774.163,93
G	493.489,40	-343.790,74	356.708,14	-269.350,09	264.383,18	422.403,35	206.713,89
H	-827.217,79	533.492,22	-499.465,95	-726.582,15	-959.143,04	-327.298,14	-244.735,55
I	402.876,87	-57.875,28	9.898,80	-268.748,73	40.564,82	74.519,88	74.209,42
J	2.382.672,57	-320.516,47	915.541,79	67.883,89	129.467,89	202.276,86	430.026,92
K	67.477,31	-77.827,25	73.213,32	-7.382,83	36.322,52	31.077,90	56.070,80
L	185.288,10	-30.068,11	62.025,58	-26.299,45	9.796,74	18.662,07	36.526,92
M, N	2.995,78	-6.829,06	8.673,23	-11.111,56	8.144,23	5.243,67	330,05

O	66.912,15	15.821,16	13.333,36	-14.472,96	14.563,91	22.165,07	9.467,70
P	85.767,21	-62.375,72	47.166,01	-24.951,74	65.201,40	63.566,60	81.104,83
Q	85.949,21	-13.187,65	42.574,99	12.424,02	44.272,81	38.772,71	47.720,48
R, S, T, U	-58.144,17	-1.791,20	38.898,95	-68.548,26	24.861,79	20.289,25	-1.778,57
TOTAL	2.924.893,66	-1.960.774,20	1.613.905,01	-2.275.903,51	770.383,66	1.886.291,13	2.434.519,83

Sumber: BPS (2025)

Berdasarkan tabel 4.17, Kota Surakarta memiliki daya saing di beberapa sektor ekonomi seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Kabupaten Boyolali mengandalkan dua sektor saja yaitu transportasi dan perdagangan serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Kabupaten Sukoharjo memiliki cukup banyak sektor yang menjadi keunggulan komparatif sekaligus berdaya saing kuat diantaranya sektor industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi perusahaan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Kabupaten Karanganyar mengandalkan empat sektor ekonomi sebagai sektor dengan kemampuan daya saing kuat yaitu sektor pertambangan dan penggalan; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; informasi dan komunikasi; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Sedangkan di Kabupaten

Wonogiri hanya satu sektor yang dinilai tidak memiliki daya saing yaitu sektor transportasi dan pergudangan, sektor lainnya memiliki daya saing terhadap ekonomi Solo Raya. Kabupaten Sragen juga cukup dominan dalam berkontribusi pada persaingan sektor ekonomi dimana hanya satu sektor yang dinilai tidak memiliki keunggulan komparatif yaitu sektor transportasi dan pergudangan dimana kelemahan ini sama dengan yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri. Terakhir, Kabupaten Klaten memiliki kemampuan dan daya saing di beberapa sektor ekonomi antara lain, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; pertambangan dan penggaliannya; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; serta jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Kemudian setelah seluruh perhitungan komponen-komponen shift share di Kawasan Solo Raya dianalisis, dapat diketahui total keseluruhan nilai shift share di tiap kabupaten/kota Kawasan Solo Raya.

Tabel 4.18
Analisis Perhitungan *Shift share* (Dij) Kabupaten/Kota di Kawasan Solo Raya Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

Sektor	Kota Surakarta	Kabupaten Boyolali	Kabupaten Sukoharjo	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Wonogiri	Kabupaten Sragen	Kabupaten Klaten
A	27.988,32	-8.457,97	258.595,18	165.878,26	807.750,95	300.124,09	293.496,71
B	-69,12	-840,74	-1.301,25	18.735,97	51.507,40	69.200,19	111.138,87
C	333.015,03	-615.517,46	951.823,61	27.998,10	725.947,56	1.652.694,65	1.361.830,64
D	19.601,34	-605,65	4.926,87	131,38	3.289,28	4.988,50	12.795,75
E	3.095,88	-912,82	2.090,97	1.747,53	3.067,62	2.240,10	2.768,56
F	392.427,37	-140.997,44	219.518,53	-69.619,59	188.111,96	251.219,87	880.394,11

G	1.000.367,60	-149.194,18	661.103,37	-68.619,45	494.146,21	760.272,31	510.862,97
H	-720.384,95	647.715,44	-394.097,97	-649.027,18	-791.040,83	-250.962,02	-176.678,99
I	530.830,24	-9.389,92	86.151,79	-202.918,86	79.814,12	140.971,40	154.069,81
J	2.708.912,16	-265.090,35	1.017.195,23	96.766,05	147.122,48	234.160,75	507.624,17
K	138.582,10	-48.571,02	128.701,07	46.489,57	74.129,64	74.876,97	111.152,28
L	276.992,65	-11.556,20	104.672,46	5.010,25	20.614,47	35.730,30	62.615,38
M, N	20.573,33	-1.153,05	15.609,74	-4.592,76	13.892,78	13.176,45	6.554,99
O	175.165,16	47.661,92	47.148,62	14.368,10	48.272,23	54.387,37	48.036,14
P	176.342,89	12.559,71	108.183,42	37.568,91	143.532,79	131.413,20	192.703,69
Q	108.902,78	649,90	58.263,30	25.709,82	57.361,46	51.334,79	68.083,37
R, S, T, U	-34.642,18	26.638,62	65.916,38	-40.552,93	53.164,78	51.909,44	34.665,74
TOTAL	5.157.700,60	-517.061,19	3.334.501,33	-594.926,85	2.120.684,90	3.577.738,37	4.182.114,18

Sumber: BPS (2025)

Pada tabel 4.18 diperlihatkan total perhitungan shift share (Dij) sebagai hasil dari penjumlahan keseluruhan dari Nij, Mij, dan Cij. Besaran angka inilah yang menjadi gambaran bagaimana perkembangan dan pertumbuhan perekonomian di Kawasan Solo Raya selama kurun waktu 2019-2023. Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata sektor yang ada di kabupaten/kota Kawasan Solo Raya mengalami pertumbuhan perekonomian dalam rentang waktu 2019-2023. Hal ini dapat dilihat dari nilai positif di sebagian besar sektor yang ada di beberapa kabupaten/kota, meskipun untuk beberapa sektor di Kabupaten Boyolali rata-rata mengalami penurunan secara masif kecuali sektor transportasi dan perdagangan; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Kota Surakarta mengalami penurunan di sektor pertambangan dan penggalan; transportasi dan perdagangan; dan jasa lainnya. Begitu juga dengan Kabupaten Sukoharjo yang menurun di sektor pertambangan dan penggalan serta transportasi dan perdagangan. Kabupaten Karanganyar mengalami perkembangan perekonomian yang cukup lambat di enam sektor diantaranya, konstruksi;

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa perusahaan; serta jasa lainnya. Kabupaten Wonogiri, Sragen, dan Klaten hanya mengalami penurunan di sektor transportasi dan pergudangan.

Klasifikasi Sektor Ekonomi Unggulan

Setiap sektor ekonomi di kabupaten/kota yang dinilai memiliki keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif dianggap dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kawasan Solo Raya. Penggunaan metode analisis LQ dan juga Shift share masing-masing melihat sektor ekonomi dari keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki. Metode *location quotient* mengklasifikasikan sektor ekonomi berdasarkan basis dan non basis, dimana apabila suatu sektor basis di kabupaten/kota berkembang secara pesat maka secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan sektor-sektor non basisnya. Sedangkan dalam analisis Shift share, nilai-nilai perhitungan dari Cij dan Dij sangat penting dalam melihat sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya saing sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan aktivitas ekonomi di kabupaten/kota sekaligus memperlihatkan bagaimana pergerakan naik atau turun kinerja dari sektor-sektor yang ada.

Berdasarkan tabel 4.19, pengelompokan sektor-sektor ekonomi di kabupaten/kota dibagi menjadi empat tipe dengan pengklasifikasian berbeda. Tipe I mengindikasikan daerah dengan sektor yang memiliki nilai $LQ \geq 1$ dan $Cij \geq 0$ dimana hal ini menandakan suatu daerah memiliki sektor basis yang berkembang pesat dan memiliki daya saing kuat sehingga mampu menopang kegiatan

perekonomian di daerah tersebut. Tipe II adalah daerah dengan sektor ekonomi $LQ \geq 1$ dan $Cij < 0$ dimana suatu sektor memiliki sektor basis namun perkembangannya cukup lambat. Tipe III ($LQ < 1$ dan $Cij > 0$) merupakan daerah yang bertumpu pada sektor non basis namun perkembangannya cukup cepat dan dianggap memiliki daya saing sehingga kedepannya memungkinkan untuk sektor tersebut menjadi sektor basis dan mampu mendukung pertumbuhan perekonomian kabupaten/kota. Terakhir, tipe IV dimana nilai $LQ < 1$ dan $Cij < 0$ yang artinya sektor di daerah tersebut merupakan sektor non basis dan tidak memiliki daya saing.

Tabel 4.19
Hasil Analisis Location Quotient dan Shift Share Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya

Sektor	Tipe I	Tipe II	Tipe III	Tipe IV
A	Wonogiri Sragen	Boyolali Karanganyar	Surakarta Sukoharjo Klaten	
B	Wonogiri Sragen Klaten	Boyolali	Karanganyar	Surakarta Sukoharjo
C	Sukoharjo Sragen Klaten	Boyolali Karanganyar	Surakarta Wonogiri	
D	Surakarta Sragen Klaten	Karanganyar	Sukoharjo Wonogiri	Boyolali
E	Karanganyar	Surakarta	Sukoharjo Wonogiri Sragen Klaten	Boyolali
F		Surakarta	Sukoharjo Wonogiri Sragen Klaten	Boyolali Karanganyar
G	Surakarta Sukoharjo Wonogiri Sragen		Klaten	Boyolali Karanganyar
H	Boyolali	Sukoharjo Wonogiri		Surakarta Karanganyar Sragen Klaten
I	Surakarta Sukoharjo Klaten		Wonogiri Sragen	Boyolali Karanganyar

J	Surakarta Sukoharjo		Karanganyar Wonogiri Sragen Klaten	Boyolali
K	Surakarta Sukoharjo Klaten	Karanganyar	Wonogiri Sragen	Boyolali
L	Surakarta Sukoharjo		Wonogiri Sragen Klaten	Boyolali Karanganyar
M, N	Surakarta	Sukoharjo	Wonogiri Sragen Klaten	Boyolali Karanganyar
O	Surakarta	Sukoharjo	Boyolali Wonogiri Sragen Klaten	Karanganyar
P	Wonogiri Klaten Surakarta	Boyolali Sukoharjo	Surakarta Sragen	Karanganyar
Q	Wonogiri Klaten	Sukoharjo	Karanganyar Sragen	Boyolali
R, S, T, U	Wonogiri Sragen	Boyolali Sukoharjo Karanganyar Klaten		Surakarta

Berdasarkan analisis LQ dan Shift share yang digabungkan dalam hasil analisis pada tabel 4.19, disimpulkan bahwa beberapa sektor ekonomi menjadi faktor pendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Sektor industri dan pengolahan dianggap sebagai sektor paling berpotensi yang sebagian besarnya tersebar di Kabupaten Sukoharjo, Sragen, dan Klaten. Kota Surakarta dan Kabupaten Wonogiri juga dinilai mampu menjadi daerah yang kedepannya dapat meningkatkan kinerja sektor ini apabila melihat hasil pengelompokan sektor ekonomi. Sektor kedua yaitu perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dimana sektor ini menjadi unggulan di daerah Surakarta dan Sukoharjo.

Kabupaten/kota di Kawasan Solo Raya juga memiliki sektor ekonomi

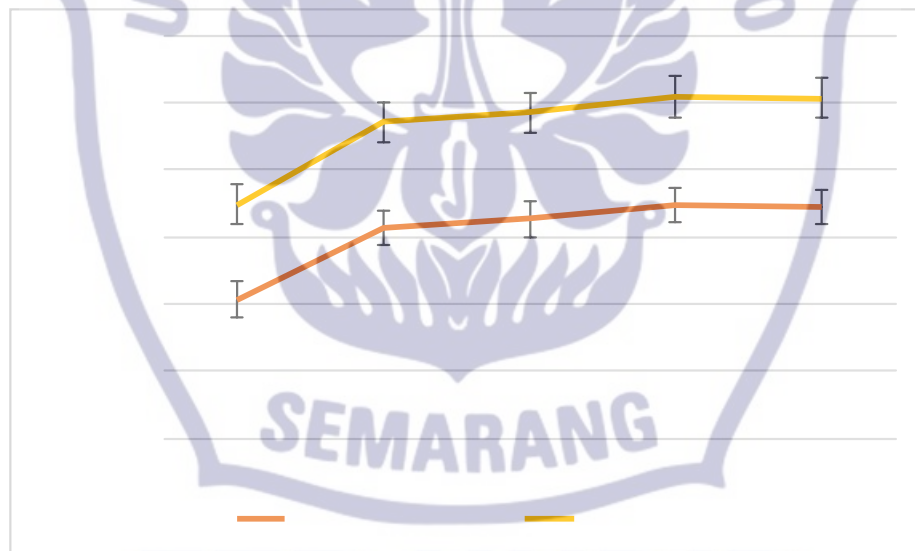
potensial di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang memiliki basis terbesar di Kabupaten Wonogiri dan Sragen, namun melihat klasifikasi pada tabel 4.19, daerah lain seperti Surakarta, Klaten, dan Sukoharjo dianggap cukup diperhitungkan sebagai daerah yang mampu mendorong perkembangan perekonomian melalui sektor ini kedepannya. Sektor informasi dan komunikasi juga menjadi sektor kunci dalam memberikan kontribusi pada pertumbuhan perekonomian Solo Raya, Kota Surakarta dan Kabupaten Sukoharjo menjadi wilayah dengan kontribusi besar pada sektor ini sedangkan Kabupaten Karanganyar dan Boyolali dinilai memiliki potensi dalam mengembangkan sektor ini sebagai sektor basis kedepannya. Berdasarkan pada tabel analisis 4.19 juga dapat dilihat sektor transportasi dan pergudangan menjadi sektor dengan kontribusi terkecil bagi pertumbuhan ekonomi Kawasan Solo Raya sehingga perannya hanya sebagai sektor pendukung bagi sektor-sektor basis lainnya. Dengan demikian diperoleh kesimpulan bahwa sektor-sektor basis di beberapa daerah menjadi penopang utama perekonomian Solo Raya seperti industri pengolahan; pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor; serta informasi dan komunikasi. Selain itu minimnya kontribusi yang diberikan sektor lain seperti sektor transportasi dan pergudangan serta sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang menjadi titik sadar akan pentingnya masing-masing sektor untuk dikembangkan secara optimal dan efisien sehingga mampu meminimalisir angka ketimpangan yang ada antar kabupaten/kota.

4.3 Interpretasi Data

Ketimpangan yang terjadi di Kawasan Solo Raya umumnya disebabkan oleh

adanya perbedaan pada kemampuan suatu kabupaten/kota dalam mengolah dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi yang menjadi penopang utama perekonomian wilayah tersebut. Nilai PDRB Perkapita dan angka laju pertumbuhan menjadi salah satu indikator penting dalam melihat bagaimana kondisi perekonomian di Kawasan Solo Raya. Hasil analisis dari Indeks Williamson dan juga Indeks Theil yang cenderung konsisten dan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam periode waktu 2019-2023 menjadi gambaran jelas dari terjadinya peningkatan angka ketimpangan di Kawasan Solo Raya.

Gambar 4.2
Tren Perkembangan Ketimpangan di Kabupaten/Kota Kawasan Solo Raya
2019-2023



Sumber: Hasil penghitungan penulis

Berdasarkan Gambar 4.2, perkembangan Indeks Williamson dan Indeks Theil kerap mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, terutama pada periode waktu 2019-2020 terjadi kenaikan cukup signifikan yang disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 dan menyebabkan kelumpuhan perekonomian di berbagai wilayah. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan angka PDRB perkapita sebesar 7,43% di

Kawasan Solo Raya pada tahun 2020, dengan seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan pada angka PDRB perkapita. Kota Surakarta menjadi daerah dengan penurunan terkecil yaitu 2,29% sedangkan Kabupaten Sragen menjadi daerah dengan penurunan PDRB perkapita terbesar yaitu 10,50% di tahun 2020 (BPS, 2023). Akan tetapi, di tahun berikutnya seluruh kabupaten/kota mengalami peningkatan angka PDRB perkapita secara perlahan dengan Kota Surakarta mengalami pertumbuhan PDRB tertinggi yaitu 3,94% dan Kabupaten Boyolali di posisi kedua dengan 3,89%. Kabupaten Wonogiri menjadi daerah dengan pertumbuhan PDRB perkapita paling lambat dibandingkan daerah lainnya yaitu 2,74% di tahun 2021 (BPS, 2023).

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dan pernah dilakukan sebelumnya mengambil metode yang sama dalam mengukur besar ketimpangan yang terjadi antar wilayah diantaranya penelitian oleh Kalzum R. Jumiyaniti di Gorontalo menggunakan analisis LQ dalam menentukan sektor basis dan non basis, penelitian oleh Cindy Candrawati et.al mengenai analisis potensi dan ketimpangan di Kepulauan Riau, penelitian Subhan Purwadinata et.al yang menganalisis potensi ekonomi di NTB, dan masih banyak lagi referensi terdahulu dengan metode relevan sebagai acuan. Penelitian-penelitian tersebut mengedepankan pentingnya mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi menjadi sektor basis dan non basis sehingga dapat dianalisis lebih lanjut mengenai potensi yang dimiliki sektor-sektor tersebut.

Kota Surakarta sebagai area pusat dari Kawasan Solo Raya tentu menjadi central dari kegiatan perekonomian dari daerah-daerah sekitarnya dimana hal ini

secara tidak langsung justru berkontribusi pada angka ketimpangan paling besar di Kawasan Solo Raya itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan menghitung Indeks Williamson daerah-daerah di sekitar Kota Surakarta itu sendiri yang mencakup Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten seperti yang terlihat pada tabel 4.20 dibawah.

Tabel 4.20
Perbandingan Indeks Williamson Kawasan Solo Raya

Angka Ketimpangan Wilayah (IW)	Tahun					Rata- rata
	2019	2020	2021	2022	2023	
Total Keseluruhan	0,3814	0,4029	0,4053	0,4093	0,4090	0,4016
Kecuali Kota Surakarta	0,2133	0,2302	0,2314	0,2332	0,2311	0,2278

Sumber: Hasil estimasi penulis

Berdasarkan tabel 4.20, dapat dilihat bahwa nilai Indeks Williamson antar kabupaten cenderung rendah dibandingkan dengan nilai ketimpangan yang memasukkan Kota Surakarta dalam cakupannya. Nilai indeks ketimpangan dalam rentang tahun yang sama jauh lebih rendah dan mendekati nol dibandingkan nilai Indeks Williamson yang dihitung secara keseluruhan Kawasan Solo Raya. Rata-rata 0,2278 menjadi pertanda bahwa kondisi pertumbuhan antar kabupaten di Kawasan Solo Raya cukup setara atau relatif sama. Hal ini berbanding terbalik dengan rata-rata nilai IW keseluruhan sebesar 0,4016 yang menjauhi nol yang dalam arti lain tingkat ketimpangan yang terjadi lebih tinggi dengan melibatkan Kota Surakarta di dalamnya.

Rendahnya angka IW antar kabupaten disebabkan oleh latar belakang struktur perekonomiannya yang masih cukup sederhana dengan banyak mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan ataupun sektor industri pengolahan

sehingga pembangunan dan pertumbuhan ekonomi antar sesama kabupaten jauh lebih merata. Oleh karena itu tiap kabupaten dalam Kawasan Solo Raya perlu meningkatkan kinerja dari sektor-sektor basis atau berpotensi wilayah dengan tujuan mengurangi angka ketimpangan yang ada antara kabupaten dan kota. Beberapa langkah perlu diambil dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor-sektor ekonomi wilayah, dalam hal ini difokuskan pada keseluruhan daerah yang ada dengan harapan seluruh kabupaten/kota mampu mengoptimalkan potensi dari sektor-sektor tersebut hingga pada akhirnya akan menghasilkan pemerataan pembangunan. Berikut implikasi dan juga rekomendasi kebijakan dalam rangka memaksimalkan sektor unggulan di masing-masing daerah.

Gambar 4.3 Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kota Surakarta

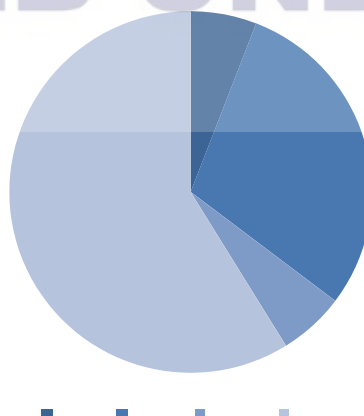


Berdasarkan kesimpulan analisis LQ dan Shift share, Kota Surakarta memiliki sebaran sektor ekonomi tipe I sebesar 53% dimana hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar sektor-sektor ekonomi di area inti ini merupakan sektor basis dan berdaya saing tinggi. Meskipun sebagian besar sektor sudah terbilang bagus dalam perkembangannya, tetap diperlukan kebijakan dan perencanaan yang tepat dalam mengembangkan sektor ekonomi yang belum

mencapai titik optimal dalam perkembangannya. Terutama dalam mempertahankan kinerja sektor utama berdaya saing tinggi seperti sektor informasi dan komunikasi, perdagangan besar dan eceran, dan sektor tipe I lainnya, diperlukan langkah signifikan yang dapat dimulai dari pembangunan jaringan internet yang lebih cepat dan luas, pemerataan sinyal internet di seluruh daerah, pengembangan e-commerce, digitalisasi sistem pembayaran, modernisasi UMKM, dan penetapan regulasi perlindungan data dan transaksi juga sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas operasional sektor.

Persentase sektor tipe IV sendiri sebesar 18% yang kurang lebih dilatarbelakangi oleh sektor pertambangan dan penggalian, transportasi dan pergudangan, dan jasa lainnya. Sektor-sektor tersebut dinilai tidak berkembang dengan baik di Surakarta dikarenakan sumber daya yang mendukung terutama untuk sektor pertambangan. Untuk sektor transportasi dan pergudangan sendiri, meskipun Surakarta sebagai area inti memiliki infrastruktur jalan yang baik akan tetapi luas wilayah yang kecil mengakibatkan terbatasnya aktivitas distribusi barang, selain itu pembuatan gudang berskala besar cenderung sulit dikarenakan keterbatasan lahan.

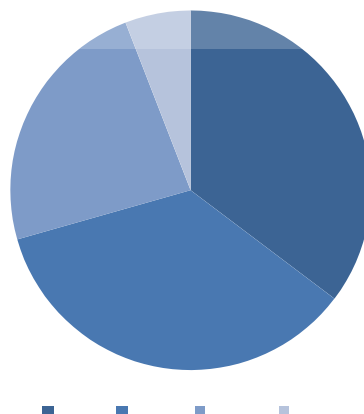
Gambar 4.4 Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Boyolali



Kabupaten Boyolali menjadi daerah dengan persentase sektor ekonomi tipe IV terbesar yaitu 59% yang artinya hampir sebagian besar sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Boyolali merupakan sektor non basis dan tidak memiliki daya saing. Berkebalikan dengan Kota Surakarta yang memiliki cukup banyak sektor bertipe I, Boyolali hanya memiliki satu sektor yaitu sektor transportasi dan pergudangan dimana hal tersebut dilatarbelakangi oleh luasnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang cenderung murah dibandingkan daerah lainnya. Boyolali sendiri dinilai krusial dalam menghubungkan daerah seperti Surakarta dengan beberapa daerah lainnya diluar Solo Raya seperti Semarang dan Yogyakarta.

Hal inilah yang menjadikan operasional logistik dan distribusi barang cukup dominan dan penting di Boyolali sehingga perlu untuk menjaga dan melakukan pemeliharaan infrastruktur secara rutin, penataan dan pengawasan gudang barang agar terintegrasi dengan baik, serta digitalisasi sistem operasional baik manajemen barang guna meningkatkan efisiensi dan meminimalisir error yang terjadi. Kebijakan dan perencanaan yang tepat dari pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik secara signifikan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Boyolali secara berkelanjutan.

Gambar 4.5 Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Sukoharjo



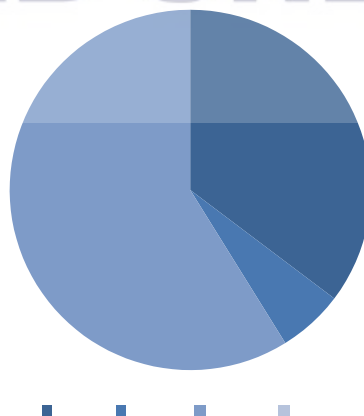
Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu daerah yang cukup seimbang dilihat dari persentase yang ada, sektor tipe I dan II mempunyai persentase 35% yang mana artinya cukup banyak sektor basis meski tidak semuanya berdaya saing tinggi. Sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor paling berpengaruh di Kabupaten Sukoharjo dengan kemampuannya sebagai salah satu sektor basis berdaya saing tinggi, hal tersebut didorong oleh banyaknya klaster industri yang ada seperti industri tekstil, plastik, furnitur, dan makanan minuman, selain itu juga karena ketersediaan lahan yang cukup luas dan tenaga kerja melimpah yang kompetitif mendukung produktivitas industri di Kabupaten Sukoharjo. Penting bagi pemerintah daerah untuk menjaga iklim industri yang ada dengan peningkatan investasi dan inovasi strategi industri, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan dan permintaan pasar baik dari dalam daerah maupun luar daerah sekalipun.

Gambar 4.6 Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Karanganyar



Menurut Gambar 4.5, sektor tipe IV di Kabupaten Karanganyar memiliki persentase hampir setengah dari keseluruhan sektor yang ada yaitu 47% dimana hal tersebut mengindikasikan adanya kekurangan dalam optimalisasi sektor-sektor pendukung yang mana terlebih lagi sektor tipe I hanya sebesar 6%. Kabupaten Karanganyar sendiri memiliki kelebihan pada sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dimana faktor yang paling memengaruhi adalah ketersediaan sumber air alami yang melimpah dan kondisi geografis yang mendukung. Selain itu sistem pengelolaan sampah terpadu baik sampah pemukiman maupun industri serta program pemerintah dalam mengawasi kebersihan dan limbah dinilai sangat penting dalam mendukung perkembangan sektor ini secara berkelanjutan. Sektor pertanian juga memainkan peran penting dikarenakan demografis wilayah yang berada di lereng Gunung Lawu menjadikan tanah cukup subur dan sistem pengairan berfungsi dengan baik. Melihat hal tersebut, alangkah baiknya pemerintah merencanakan pengembangan sektor yang relevan dengan keunggulan geografis wilayah tersebut dan memanfaatkan sumber daya alam yang mendukung seperti misalnya peningkatan industri wisata dan efisiensi pengelolaan sistem air bersih guna menjaga kualitas air daerah.

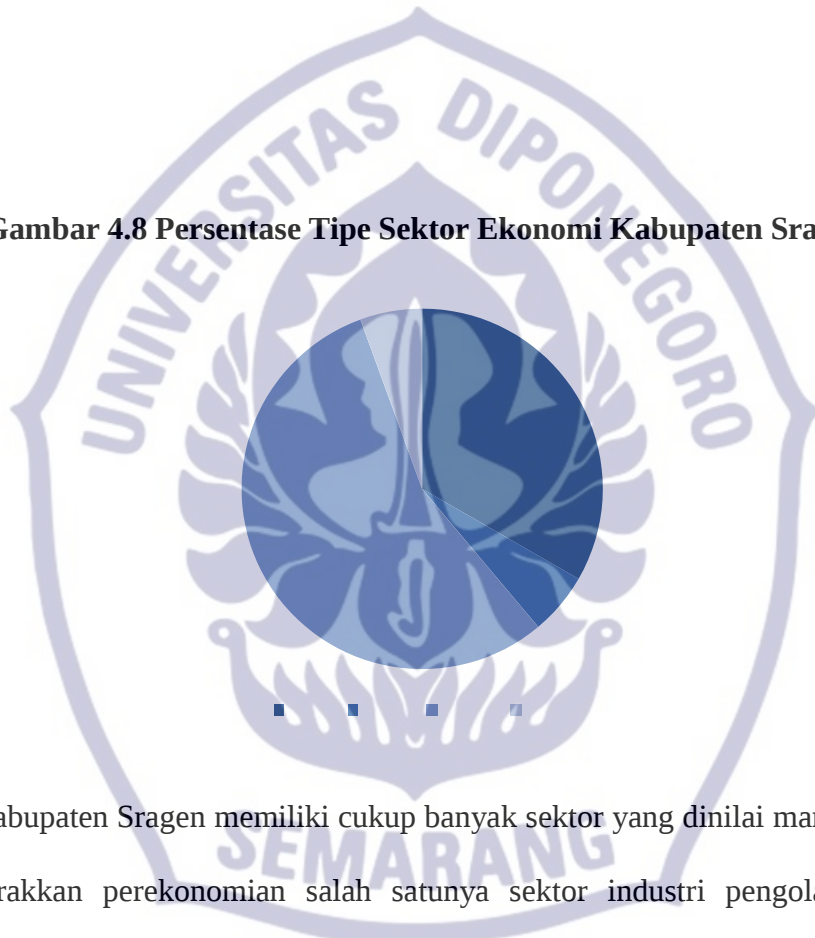
Gambar 4.7 Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Wonogiri



Seperti yang terlihat pada Gambar 4.5, Kabupaten Wonogiri menjadi satu-satunya daerah yang tidak memiliki sektor dengan kategori tipe IV. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh sektor ekonomi di Kabupaten Wonogiri dapat berfungsi dan menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah meskipun kontribusi yang diberikan tidak terlalu menonjol. Kabupaten Wonogiri didominasi oleh sektor kategori tipe III dimana suatu sektor bukan merupakan sektor basis namun masih memiliki daya saing yang terbilang kuat atau mampu bersaing. Hal ini menandakan sektor yang ada tidak menutup kemungkinan akan menjadi sektor basis dalam beberapa tahun mendatang. Sektor ekonomi yang menjadi pendorong utama di daerah ini yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan merupakan sektor basis dan berdaya saing tinggi, selain itu ada sektor pertambangan dan penggalian meskipun daya saingnya tidak setinggi sektor pertanian. Kabupaten Wonogiri cukup berfokus pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai sektor utama mereka dengan disertai kebijakan dan program yang mampu menjaga kestabilan operasional sektor, misalnya seperti program sosialisasi bibit dan pupuk tanaman, penerapan sistem irigasi, penyejahteraan petani, peternak, dan nelayan air tawar, serta kebijakan perlindungan hutan. Perencanaan kebijakan dan implikasinya ini dinilai relevan melihat sebagian besar masyarakat Kabupaten Wonogiri yang masih bekerja di sektor primer seperti petani dan nelayan, terlebih dengan kondisi alam yang cukup subur dan bercurah hujan

cukup menjadikannya sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Keberadaan Waduk Gajah Mungkur juga menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas perikanan dan pengairan sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas warga setempat.

Gambar 4.8 Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Sragen



Kabupaten Sragen memiliki cukup banyak sektor yang dinilai mampu dalam menggerakkan perekonomian salah satunya sektor industri pengolahan yang memiliki daya saing tinggi dan juga merupakan sektor basis. Ini dilatarbelakangi oleh lokasi strategis Kabupaten Sragen yang menjadi penghubung antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur, selain itu berdasarkan pada teori Weber, efisiensi produksi suatu aktivitas ekonomi dipengaruhi oleh jarak transportasi utama dimana Kabupaten Sragen memiliki hal tersebut sehingga beberapa dampak positif seperti memudahkan distribusi, biaya logistik cenderung murah, dan adanya daya tarik bagi

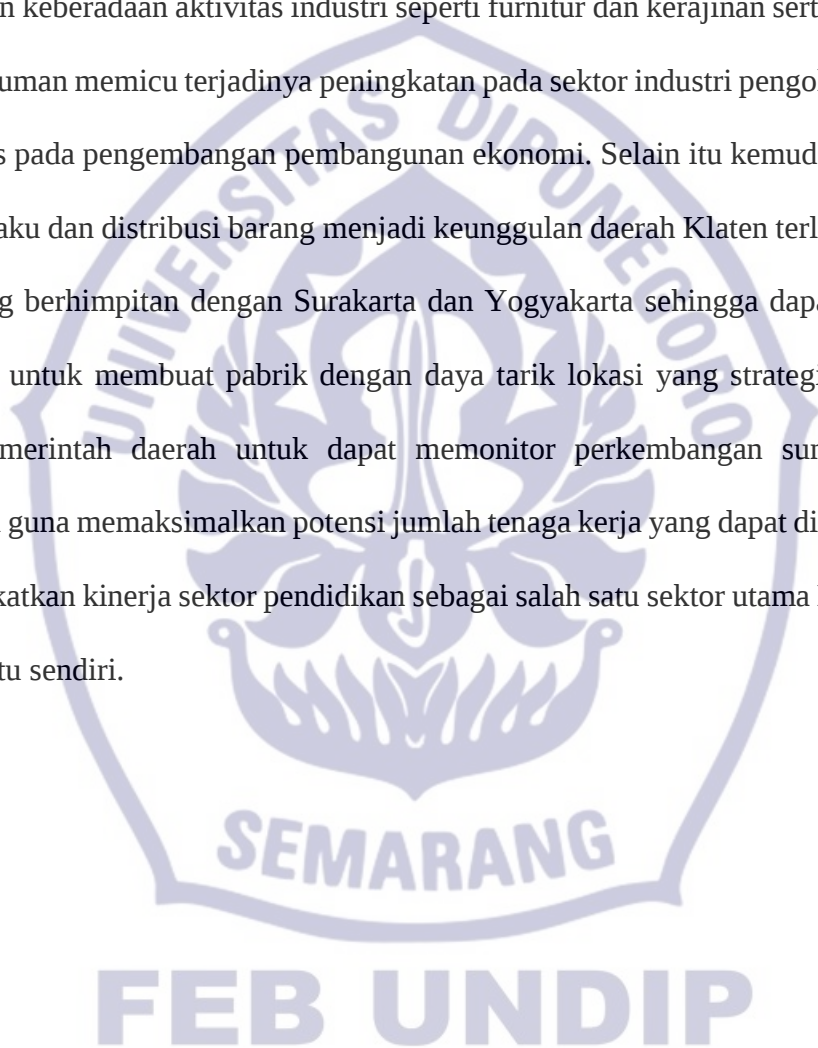
investor untuk mendirikan industri. Terlebih lagi didukung dengan daerah yang luas dan pasokan tenaga kerja melimpah juga menjadi faktor utama peningkatan output perekonomian daerah. Melihat hal tersebut, diperlukan regulasi yang mengatur penyediaan fasilitas distribusi dan pemeliharaan akses agar menjaga stabilitas dari operasional logistik, rencana jangka panjang untuk menarik investor demi meningkatkan daerah industri yang mumpuni juga diperlukan guna mengembangkan sektor industri daerah yang terpadu. Keberadaan sektor-sektor non basis yang dalam rentang waktu penelitian ini memiliki besaran hampir menyentuh ambang batas sektor basis menandakan bahwa suatu sektor tersebut dinilai mampu berkembang lebih apabila diiringi dengan pengelolaan yang tepat sehingga tidak menutup kemungkinan kedepannya akan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Sragen.

Gambar 4.9 Persentase Tipe Sektor Ekonomi Kabupaten Klaten



Pada Gambar 4.8 diperlihatkan bahwa Kabupaten Klaten cukup memiliki daya saing tinggi pada sektor ekonominya, sesuai pada persentase tipe I dan tipe III masing-masing sebesar 41% dan 43%. Kabupaten Klaten cukup mengandalkan

sektor industri pengolahan dan jasa pendidikan dimana keduanya merupakan sektor basis dengan daya saing tinggi di Kawasan Solo Raya. Daerah Klaten yang berdekatan dengan dua daerah padat yaitu Surakarta dan Yogyakarta secara tidak langsung mendorong perkembangan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja yang besar dan keberadaan aktivitas industri seperti furnitur dan kerajinan serta makanan dan minuman memicu terjadinya peningkatan pada sektor industri pengolahan yang berfokus pada pengembangan pembangunan ekonomi. Selain itu kemudahan akses bahan baku dan distribusi barang menjadi keunggulan daerah Klaten terlebih posisinya yang berhimpitan dengan Surakarta dan Yogyakarta sehingga dapat menarik investor untuk membuat pabrik dengan daya tarik lokasi yang strategis. Penting bagi pemerintah daerah untuk dapat memonitor perkembangan sumber daya manusia guna memaksimalkan potensi jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, juga meningkatkan kinerja sektor pendidikan sebagai salah satu sektor utama Kabupaten Klaten itu sendiri.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan metode analisis diatas mengenai ketimpangan antar kabupaten/kota serta sektor ekonomi wilayah yang mencakup basis dan non basis di Kawasan Solo Raya dalam periode waktu 2019-2023, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Menurut hasil analisis menggunakan metode Indeks Williamson dan Indeks Theil, tingkat disparitas yang terjadi di Kawasan Solo Raya tergolong menengah ke atas dengan adanya peningkatan secara perlahan setiap tahunnya hingga akhir tahun penelitian. Ketimpangan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta sebagai area inti dengan kabupaten di sekitarnya cukup jauh, sedangkan di sisi lain perbedaan yang ditunjukkan antar kabupaten di Kawasan Solo Raya tidak terlalu signifikan sehingga tingkat ketimpangan yang ada tidak terlalu besar. Perbedaan signifikan pada nilai tingkat disparitas ini secara tidak langsung menunjukkan bagaimana suatu daerah dalam mengelola daerah mereka sendiri, daerah seperti Kota Surakarta yang memiliki ketersediaan sarana dan prasarana disertai dengan kemampuan dalam mengelola potensi yang ada menjadikannya cukup kuat dan dominan, sedangkan daerah-daerah sekitarnya yang meskipun memiliki keunikan dan ciri khas daerahnya masing-masing, belum mampu mengoptimalkan output

yang dihasilkan. Dilatarbelakangi oleh banyak faktor seperti kemampuan tenaga kerja, ketersediaan infrastruktur, kebijakan dan regulasi yang mendukung, dan beberapa mencakup langkah yang tepat dalam optimalisasi masing-masing sektor ekonomi itu sendiri.

2. Terdapat beberapa sektor ekonomi potensial yang dinilai memiliki kontribusi paling besar bagi pertumbuhan dan pembangunan Kawasan Solo Raya diantaranya sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi fokus utama daerah seperti Wonogiri dan Sragen, selain itu Karanganyar dan Boyolali juga cukup bergantung pada sektor ini sebagai sektor basis meskipun tidak memiliki daya saing yang kuat secara regional kawasan. Kedua, sektor industri pengolahan yang tersebar di daerah Sukoharjo, Sragen, dan Klaten. Ketiga, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang menjadi sektor utama daerah Surakarta dan Sukoharjo. Sektor basis di beberapa daerah tersebut juga didukung dengan kontribusi dari sektor-sektor lain diantaranya sektor yang meskipun juga termasuk sektor basis, namun daya saing nya tidak terlalu kuat dan sektor yang tidak termasuk sektor basis atau pendukung. Keberadaan sektor-sektor tersebut yang kemudian diklasifikasikan dalam empat tipe sektor ekonomi memberikan gambaran sektor apa saja yang benar-benar mampu menjadi roda penggerak utama perekonomian di suatu daerah, sektor apa yang cukup paten secara kemampuan output namun daya saingnya cenderung rendah, sektor yang bukan merupakan sektor unggulan namun memiliki kemampuan bersaing tinggi sehingga ada asumsi bahwa dalam beberapa tahun mendatang sektor

tersebut dapat menjadi salah satu sektor penopang utama aktivitas perekonomian daerah, terakhir sektor yang sama sekali tidak memiliki peran vital di suatu daerah sehingga tidak menghasilkan nilai kontribusi berarti bagi suatu wilayah.

5.2 Keterbatasan

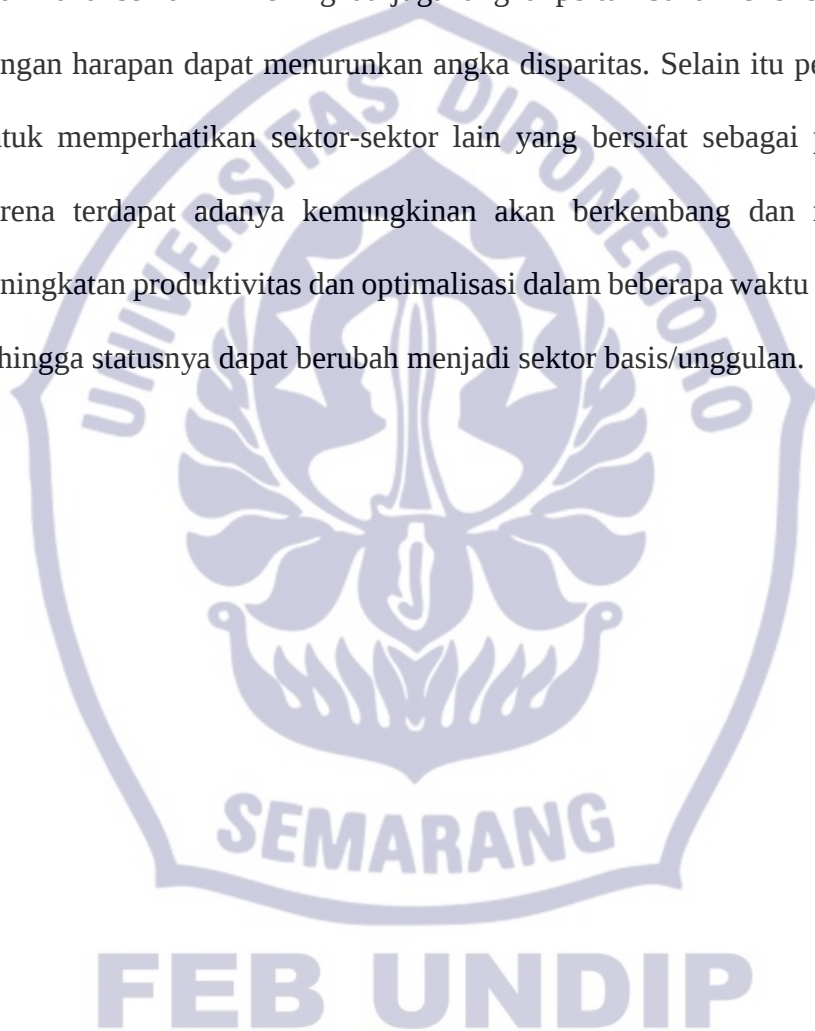
Penelitian ini membahas mengenai pengklasifikasian sektor-sektor ekonomi di kabupaten/kota Kawasan Solo Raya menjadi basis dan non basis sehingga cukup terbatas dalam penyampaian informasi mengenai relevansi sektor satu dengan sektor lainnya sehingga tidak dijelaskan secara rinci mengenai hubungan tiap sektor yang ada. Hal ini diharapkan dapat menjadi dasar sekaligus referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik serupa.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan dari penelitian yang dilakukan, beberapa saran serta sedikit tinjauan yang dapat diberikan kepada pemerintah daerah khususnya Provinsi Jawa Tengah dan Kawasan Solo Raya yaitu, antara lain:

1. Pemerintah daerah di kabupaten/kota dalam Kawasan Solo Raya sebaiknya meningkatkan kerjasama regional antar daerah dengan sektor basis yang sama dengan tujuan mendorong efisiensi dan produktivitas lebih ke tingkat nasional. Hal ini juga sekaligus ditujukan untuk mengupayakan daerah-daerah tersebut agar berfokus pada sektor ekonomi basis masing-masing guna mendorong pertumbuhan ekonomi dengan berbagai macam upaya pengembangan, baik dari internal daerah ataupun melalui hubungan eksternal.
2. Upaya dalam menjadikan sektor-sektor basis di beberapa daerah untuk tidak

hanya berperan sebagai penunjang utama perekonomian di daerah tersebut namun juga untuk memiliki daya saing yang kuat sehingga mampu memberikan dampak secara tidak langsung bagi sektor-sektor ekonomi lainnya. Semakin tinggi kemampuan daya saing suatu sektor potensial yang ada maka semakin meningkat juga angka pertumbuhan ekonomi daerah dengan harapan dapat menurunkan angka disparitas. Selain itu penting juga untuk memperhatikan sektor-sektor lain yang bersifat sebagai pendukung karena terdapat adanya kemungkinan akan berkembang dan mengalami peningkatan produktivitas dan optimalisasi dalam beberapa waktu mendatang sehingga statusnya dapat berubah menjadi sektor basis/unggulan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A. N., Ananda, V. D., Nurhakim, R. R., Rahma, F., & Muhammad, I. (2025). *Studi Ketimpangan Wilayah dan Potensi Ekonomi di Kabupaten Badung , Provinsi Bali Study of Regional Disparities and Economic Potential in Badung Regency , Bali Province*. 11, 1656–1663. (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Aidar, N., & Syahputra, R. (2015). Analisis Disparitas Pendapatan Regional di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 02(01), 56–68. (diunduh pada 30 Juli 2025)
- Amruddin, A. (2020). Ketimpangan Pembangunan Di Sulawesi Barat. *Jurnal Arajang*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31605/arajang.v3i1.582> (diunduh pada 25 Juni 2025)
- Azim, A. N., Sutjipto, H., & Fahmi Ginanjar, R. A. (2022). Determinan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antarprovinsi Di Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.23969/jrie.v2i1.23> (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Bahasoan, A. N., Anwar, A. I., Lekas, M. N. J., & Asryad, R. (2024). Otonomi Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia: Literature Review. *Ekonomis: Journal of Economics and Business* Vol 8, No 1, 43-46. <http://doi.org/10.33087/ekonomis.v8i1.1119> (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Basuki, M., & Mujiraharjo, F. N. (2017). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Sleman dengan Metode Shift Share dan Location Quotient. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 15(1), 52–60. <https://doi.org/10.4103/2276-7096.188531> (diunduh pada 30 Juli 2025)
- BPS. (2025, 1 22). *[Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Sragen (Juta Rupiah)*, 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi JawaTengah : <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwOCMy/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-sragen.html>
- BPS. (2025, 1 23). *[Seri 2010] PDRB Kabupaten Boyolali Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)*, 2024. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Boyolali: <https://boyolalikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTI3IzI=-seri-2010--pdrb-kabupaten-boyolali-atas-dasar-harga-konstan-2010-menurut-lapangan-usaha.html>

- BPS. (2025, 5 29). *[Seri 2010] PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah)*, 2024. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0NyMy/-seri-2010-pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- BPS. (2025, 1 23). *[Seri 2010] PDRB SERI 2010 ATAS DASAR HARGA KONSTAN MENURUT LAPANGAN USAHA (JUTA RUPIAH) 2018-2023*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo: <https://sukoharjokab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTMzIzE=-seri-2010-pdrb-seri-2010-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-juta-rupiah-2018-2023.html>
- BPS. (2025, 6 25). *Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: <https://jateng.bps.go.id/id/publication/2024/09/27/9283c9ea14dc4c90f2b6a133b/analisis-indeks-williamson-provinsi-jawa-tengah-tahun-2019-2023.html>
- BPS. (2025, 6 30). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from Klasifikasi 17 Sektor Tabel Input-Output Indonesia 2010: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTg5OCMx/klasifikasi-17-sektor-tabel-input-output-indonesia-2010.html>
- BPS. (2025, 2 1). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri*. Retrieved from Jumlah Penduduk per Kecamatan (Jiwa), 2024: <https://wonogirikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjA1IzI=/jumlah-penduduk-per-kecamatan.html>
- BPS. (2025, 2 1). *Badan Pusat Statistik Kota Surakarta*. Retrieved from Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa), 2025: <https://surakartakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEzIzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-kota-surakarta>
- BPS. (2025, 1 23). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved from [Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Klaten (Juta Rupiah), 2023: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwMSMy/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha-kabupaten-klaten.html>

- BPS. (2025, 1 23). *Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah*. Retrieved from [Seri 2010] PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah (Juta Rupiah), 2023: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTc0MSMy/-seri-2010-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-tengah.html>
- BPS. (2025, 2 1). *Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo*. Retrieved from Satu Data Indonesia: https://katalog.data.go.id/dataset/?_kategori_limit=0&res_format=XLSX&res_format_limit=0&organization_limit=0&organization=kabupaten-sukoharjo&tags=Kependudukan
- BPS. (2025, 2 1). *Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jawa)*, 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah: <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzY2IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>
- BPS. (2025, 1 23). *PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)*, 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar: <https://karanganyarkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OCMy/pdrb-menurut-lapangan-usaha.html>
- BPS. (2025, 1 23). *PDRB Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)*, 2023. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonogiri: <https://wonogirikab.bps.go.id/id/statistics-table/2/OCMy/pdrb-menurut-lapangan-usaha-.html>
- BPS. (2025, 1 22). *PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)*, 2024. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Surakarta: <https://surakartakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQjMg==/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html>
- BPS. (2025, 1 22). *PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah)*, 2024. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Surakarta: <https://surakartakota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTQjMg==/pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-lapangan-usaha.html>

- BPS. (2025, 5 30). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta, 2019*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Kota Surakarta: <https://surakartakota.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3lTbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/population--population-growth-rate--percentage-distribution-of-population--population-density--and-population-sex-ratio-by-subdistrict-in-surakarta-muni>
- Candrawati, C., & Nugroho, A. A. (2022). *Analisis Potensi dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten / Kota di Provinsi Kepulauan Riau*. (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Data, S. (2025, 2 1). *Jumlah Penduduk Kabupaten Sragen (Jiwa)*. Retrieved from Sragen Satu Data: https://satudata.sragenkab.go.id/website/jumlah_penduduk
- Dianti, Y. (2017). Analisis Ketimpangan Pembangunan Dan Sektor Unggulan DKI Jakarta Untuk Rebound Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(5), 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf) (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Dinas Kesehatan Kota Surakarta. (2023). *Profil Kesehatan Kota Surakarta 2023 Dinas Kesehatan Kota Surakarta*. 1–207. www.dinkes.surakarta.go.id (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Dzikri Ainun Faza, Dwi Susilowati, & Zainal Arifin. (2023). Analisis Ketimpangan, Pola Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan di Kawasan Kedungsepur Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 7(2), 180–194. (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Dunn, E.S.(1960). A statistical and analytical technique for regional analysis. *Papers of the Regional Science Association*, 6, 97-112. (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Fadhilah, M. H. (2023). Analysis Of Leading Economic Sectors In Pekanbaru City. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 5(1), 38–45. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v5i1.2253> (diunduh pada 17 Juni 2025)
- Fahrizal, Sarfiah, S. N., & Juliprijanto, W. (2019). Analisis Ketimpangan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 - 2017. *DINAMIC: Directory Journal of Economic*, 1(4), 339–415. (diunduh pada 30 Juli 2025)
- Fitriyah, L., & Prabowo, P. S. (2021). Analisis Ketimpangan Pendapatan Dan Pengembangan Sektor Unggulan Wilayah Kota Di Provinsi Jawa Timur